



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PROGRAM PENYEDIAAN ARIS MINUM DAN SANITAS BERBASIS  
MASYARAKAT (PAMSIMAS) STUDI KASUS : PAMSIMAS NAGO  
SATI KELURAHAN LAMBUNG BUKIT KECAMATAN PAUH KOTA  
PADANG**

**SKRIPSI**



**FAHRIZEN  
05115017**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**

**ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITAS BERBASIS  
MASYARAKAT (PAMSIMAS)  
STUDI KASUS: PAMSIMAS NAGO SATI KELURAHAN LAMBUNG  
BUKIT KECAMATAN PAUH KOTA PADANG**

Oleh:

**FAHRIZEN**

**05 115 017**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2012**



**ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITAS BERBASIS  
MASYARAKAT (PAMSIMAS)  
STUDI KASUS: PAMSIMAS NAGO SATI KELURAHAN LAMBUNG  
BUKIT KECAMATAN PAUH KOTA PADANG**

Oleh:

**FAHRIZEN**  
**05 115 017**

**SKRIPSI**

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**



**ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITAS BERBASIS  
MASYARAKAT (PAMSIMAS)  
STUDI KASUS: PAMSIMAS NAGO SATI KELURAHAN LAMBUNG  
BUKIT KECAMATAN PAUH KOTA PADANG**

**OLEH**

**FAHRIZEN**  
**05 115 017**

**MENYETUJUI:**

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc.**  
**Nip. 19591031 198603 1 005**

**Dosen Pembimbing II**

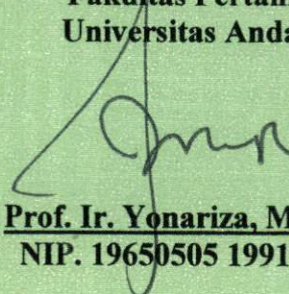
**Sri Wahyuni, S.Pt, M.Si.**  
**NIP. 19780917 200801 2 018**

**Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas**



**Prof. Ir. H. Ardi, M. Sc.**  
**NIP. 19531216 198003 1 004**

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi  
Pertanian  
Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas**

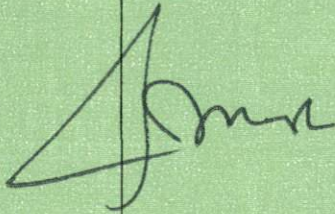


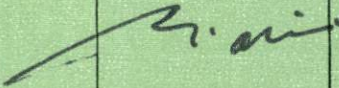


**Prof. Ir. Yonariza, M.Sc. PhD**  
**NIP. 19650505 199103 1 003**





**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia  
Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada  
Tanggal 01 Februari 2012**

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, PhD		Ketua
2.	Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc		Sekretaris
3.	Dr. Ir. Osmet, M.Sc		Anggota
4.	Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si		Anggota
5.	Sri Wahyuni, SPt, M.Si		Anggota



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Ya Allah Ya Rabbi*

*Semakin banyak ku memperoleh ilmu*

*Maka aku merasa semakin kecil*

*Semoga ilmu ini tidak menjadikan hati ini menjadi angkuh*

*Dan melupakan akan keberadaan-Mu*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin atas kehendak dan Ridho-Mu ya Allah skripsi ini dapat terselesaikan,*

Tak cukup dengan selembar kertas untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang terkasih, namun tanpa mengurangi rasa hormat inilah persembahanku.

Sebuah persembahan terbaik untuk Ayahanda Haruna dan Ibunda Rosdiana, kakanda Handro Donal serta adik-adikku Iis niarti, Elva Hardika, si bungsu Miflahul Amar, yang selalu mendo'akan serta memberikan motivasi hingga menjadikan aku manusia yang lebih tangguh....

Terimakasih untuk seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan arahan kepada saya tak lupa saya ucapkan kepada Kakek ku Mahar (alm) dan Berkat (alm), Nenek-ku Nilam, kepada Mak Uo Khadijah, Mamak ucok, Etek-etek dan semua Apak, Mamak dan Etek yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, semua sepupu yang selalu membuatku tersenyum.

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc, Ibu Sri Wahyuni, SPt, MSi, yang telah membantu membimbing dalam membuat Skripsi ini, dan tidak mengurangi rasa hormat saya, saya ucapkan banyak terimakasih kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan SOSIAL EKONOMI PERTANIAN beserta Dosen dan karyawan.

Terima Kasih kepada ketua LKM Nago Sati, Bapak Firdaus Jabar, Bang Husni Kamil Manik, SP, Bang Aguswanto, SP, Om Ibrahim Ilyas, Ni AN, Dedi Alfaresi, SH, Bang Ach Zaein, Bang Rudi, Bang Roy, dan sahabatku Eko Peyot yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya, salam kompak HIMSU dan kepada teman – teman aktivis GMNI terima kasih atas pengertiannya selama ini. Khusus buat Reza Kurniawati, S.Si, terima kasih atas bantuan dan suportnya selama ini Insyaallah akan saya ingat selalu.....

Terima kasih kepada seluruh teman-temanku mulai dari senior maupun junior serta teman seperjuangan dan seangkatan. For all best friend's RESEX (Nanda, Hamdi, Lidy, Enda, Ria, Ai, Iqbal, Ma2k, Oki, Rudi, Tio, Panjoel, Satria, Ajo, Wendi, Maidal) berjuang terus dan tetap semangat kawan. Buat Kuil, Rado, Icha, Rika, Uut, Bimbim, Haswar, Dicky, Yona, Meli dll, terima kasih atas kebersamaan selama bimbingan. Buat anak kost (Ronald, Asenk, Gery, Icel, Riko, Ardi, maidal) terima kasih atas sharing saat duka atau suka.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang belum disebutkan namanya satu persatu yang sudah membantu saya baik langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini semoga Allah SWT membalas atas kebbaikannya Amin.....



## **BIODATA**

Penulis dilahirkan di Muara Kiawai, Pasaman Barat pada tanggal 23 April 1986 sebagai anak ke 2 dari 5 bersaudara dari pasangan Haruna dan Rosdiana. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD N 02 Kartini Pasaman Barat tahun 1992–1998. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di Pondok Pesantren Nurul Huda Muara Kiawai Pasaman Barat pada tahun 1998 – 2001. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di SMK ADZKIA Padang Jurusan Otomotif pada tahun 2001 – 2004 . Pada tahun 2005 penulis diterima di Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang.

Padang, Februari 2012

Fahrizen



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada ALLAH SWT karena dengan rahmat dan rezkinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitas Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (Studi Kasus: Pamsimas Nago Sati, Kec. Pauh, Kel. Lambung Bukit, Kota Padang).**

Ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Endry Martius, MSc selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sri wahyuni, SPT. Msi selaku dosen Pembimbing II yang tak pernah lelah memberikan bimbingan, nasehat, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Ir. Yonariza, M.Sc. PhD, Bapak Dr. Ir. Osmet, M.Sc dan Ibu Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si sebagai dosen penguji, Dekan Fakultas Pertanian, dosen-dosen dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, selanjutnya Lurah Lambung Bukit, ketua LKM Nago Sati dan petugas Pamsimas yang telah memberi izin untuk pelaksanaan penelitian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan yang penulis terima di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan ilmu pertanian khususnya.

Padang, Februari 2012

FZ



## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kemiskinan .....	9
2.2. Program Pengentasan Kemiskinan.....	12
2.3. Ruang Lingkup Program PAMSIMAS .....	14
2.4. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	17
2.5. Perencanaan Pembangunan Partisipatif .....	23
2.6. Partisipasi Petani dalam Pembangunan Irigasi .....	24
2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Tempat dan Waktu .....	30
3.2. Metoda Penelitian.....	30
3.3. Teknik Pengambilan Sampel.....	30
3.4. Metoda Pengumpulan Data .....	32
3.5. Variabel yang Diamati .....	32
3.6. Analisa Data .....	35
3.7. Defenisi Operasional .....	38



#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	40
4.2. Identitas Responden dalam Partisipasi Pamsimas.....	41
4.3. Sejarah PAMSIMAS .....	42
4.4. Proses Partisipasi Masyarakat dalam Program PAMSIMAS.....	45
4.5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PAMSIMAS .....	59
4.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam PAMSIMS.....	67

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>
-----------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1. Daftar Nama Responden.....	31
2. Informan Kunci .....	32
3. Kriteria Skor untuk Masing-masing Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang .	36
4. Jumlah Penduduk Kelurahan Lambung Bukit.....	40
5. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Lambung Bukit 2010 .....	41
6. Identitas Responden dalam Partisipasi Pamsimas .....	41
7. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit 2010 .....	42
8. Kesesuaian Hasil Musyawarah Perencanaan Kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan Program pamsimas .....	47
9. Kesesuaian Hasil Musyawarah Pembentukan LKM dengan Petunjuk Pelaksanaan Program pamsimas .....	48
10. Kesesuaian Hasil Sosialisasi Pamsimas dengan Petunjuk Pelaksanaan Program pamsimas.....	51
11. Kegiatan Realisasi Anggaran Biaya .....	54
12. Kesesuaian Evaluasi Kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan Program pamsimas .....	57
13. Hasil Kegiatan Evaluasi Program Pamsimas .....	59
14. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam setiap Tahapan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi .....	59
15. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan .....	61
16. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan.....	62
17. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Pada Tahap Evaluasi .....	67
18. Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi pada Musyawarah Perencanaan kegiatan dalam program Pamsimas.....	68
19. Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi pada Musyawarah Pembentukan LKM kegiatan dalam program Pamsimas .....	68



20. Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi pada Sosialisasi dalam program Pamsimas.....	69
21. Hasil Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi partisipasi Masyarakat pada Survey Awal Lokasi dalam program Pamsimas .....	70
22. Hasil Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi partisipasi Masyarakat pada RAB dalam program Pamsimas .....	70
23. Hasil Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi partisipasi Masyarakat pada Pengadaan Barang dan Jasa dalam program Pamsimas.....	71
24. Hasil Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi partisipasi Masyarakat pada pembuatan Bak penampungan dalam program Pamsimas .....	71
25. Hasil Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi partisipasi Masyarakat pada Penggalan Pipa Saluran dalam program Pamsimas.....	72
26. Hasil Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi partisipasi Masyarakat pada Penanaman Pipa Saluran dalam program Pamsimas .....	73
27. Hasil Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi partisipasi Masyarakat pada pembuatan WC dalam program Pamsimas .....	73
28. Hasil Faktor-faktor terkait yang dapat Mempengaruhi partisipasi Masyarakat pada Tahap Evaluasi dalam program Pamsimas.....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Matriks Data set .....	81
2. Rekap Data Tingkat Partisipasi Responden Program Pamsimas .....	83
3. Lampiran Gambar .....	85
4. Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Uang LKM Nago Sati Dana Tahap I, 2, dan 3 .....	86
5. Rekapitulas Pembayaran Kepada LKM Nago Sati Dana Tahap IV ....	88
6. Ringkasan Kontrak Pamsimas .....	89
7. Berita Acara Kemajuan Kegiatan Dana Tahap V .....	90
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan .....	91
9. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana Tahap V .....	92



**ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
(PAMSIMAS) STUDI KASUS : PAMSIMAS NAGO SATI,  
KELURAHAN LAMBUNG BUKIT, KECAMATAN PAUH PADANG**

**ABSTRAK**

Penelitian dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan September 2011. Tujuan penelitian ini adalah pertama mendiskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam Program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang. Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh masyarakat RW II, kedua mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang, ketiga mengetahui faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang pada tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dengan analisa deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pengambilan responden dalam penelitian ini dilakukan secara acak sederhana yaitu sebanyak 40 orang yang merupakan anggota keluarga dari 393 keluarga pada RW II RT 01 dan 02 di kelurahan Lambung Bukit Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga tahap dalam program Pamsimas yakni Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi. Hanya pada tahap Perencanaan yang memiliki partisipasi baik. Tingkat partisipasi masyarakat pada program Pamsimas berada pada kategori Sedang-Bawah ( 41.13%), pada tahap perencanaan (65,42%), pada tahap pelaksanaan 34.64%, dan pada tahap evaluasi 13.75%. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori Sedang-Bawah. Faktor yang terkait yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain kemauan, kesempatan, kemampuan, hal ini di pengaruhi oleh faktor lain meliputi faktor sosial, Faktor Ekonomi, Faktor Budaya dan Faktor Alam, hubungan antara masyarakat ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.



**PARTICIPATION IN COMMUNITY-BASED DRINKING WATER  
PROVISION PROGRAM: A CASE OF PAMSIMAS NAGO SATI,  
KELURAHAN LAMBUNG BUKIT, KECAMATAN PAUH, PADANG**

**ABSTRACT**

This case study has three objectives. First is to explain participatory process in community-based drinking water provision in Kelurahan Lambung Bukit. Second is to measure participation rate of the people in the program. Third is to identify the factors for the participation. A survey has been carried out to interviewing 40 respondents, whom are the program targets. There were three steps of community-based drinking water provision program; i.e. planning, implemenitng and evaluating. The participation of the people in the whole of program is in medium- level. Participation in planning is high; in implementing is low; and in evaluating is very low. The factors for participation are motivation, opportunity to participate, and ability. Other factors might also correlate to participation rate, such as socio-economic status, culture, environment and social network.



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Indonesia yang sangat perlu diperhatikan menyangkut kesejahteraan rakyat, baik yang miskin maupun yang terbatas kemampuan dalam teknologi dan keahlian. Pembangunan pada dasarnya merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat, bangsa dan negara karena mengandung makna sebagai suatu perubahan menjadi keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan-perubahan yang dimaksud meliputi; perubahan ekonomi, politik, sosial, budaya dan perubahan-perubahan di bidang kehidupan masyarakat lainnya.

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penyediaan air bersih, sanitasi dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun, diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Melihat kondisi Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, kita berharap ke depannya agar bisa memerangi kemiskinan di negara ini.

Sehubungan dengan usaha penciptaan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan bank dunia memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat miskin khususnya dan masyarakat yang susah mengakses air umumnya, yang ditandai dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), yang dimulai sejak tahun 2007 hingga saat sekarang ini (Buku Panduan Pamsimas, 2009).

Pada tahun 2007 muncul kegiatan penyediaan air bersih dan peduli kesehatan masyarakat berbasis masyarakat, diperuntukan kepada golongan miskin dan susah terhadap akses air bersih, yang dinamakan Pamsimas. Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dan dunia terhadap masyarakat miskin dan masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih.

Pamsimas merupakan program bantuan pemerintah pusat yang dihibahkan langsung kepada masyarakat. Oleh karena, itu dalam implementasinya harus senantiasa melibatkan masyarakat, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. Hal ini agar masyarakat ikut berpartisipasi dan merasa ikut memiliki bentuk dari program tersebut. Untuk itu kemudian

dipersyaratkan adanya kontribusi dana dari masyarakat sebesar 20% dari total kebutuhan dana, empat persen (4%) dalam bentuk uang tunai dan 16% dapat berupa tenaga dan material.

Pamsimas bertujuan untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGs). Sasaran itu diantaranya mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan pada tahun 2015 atau sebanyak 70 juta jiwa untuk cakupan pelayanan sanitasi dan 36 juta jiwa untuk cakupan pelayanan air minum terhadap 5000 desa dan akan dilaksanakan selama 5 tahun dengan dana pinjaman dari Bank Dunia dan diharapkan dapat dimulai pada tahun anggaran 2006. (Buku Pedoman Pamsimas 2009)

Ada lima komponen program dalam program pamsimas yaitu; (1) pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal (2) peningkatan kesehatan dan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi (3) penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum (4) insentif untuk desa/ kelurahan dan kabupaten / kota dan (5) dukungan pelaksanaan dan manajemen proyek. (Buku Pedoman Pamsimas, 2009)

Sesuai dengan tujuan program, kriteria pemilihan desa/ kelurahan yang akan diikutsertakan dalam program pamsimas adalah; (1) desa/ kelurahan yang diusulkan termasuk dalam kategori desa/ kelurahan miskin berdasarkan hasil survey BPS 2004 jika miskin (2) desa/kelurahan yang diusulkan mempunyai prevalensi penyakit terkait air yang tinggi seperti angka kejadian diare di atas 1,27% per tahun (3) desa/ kelurahan yang tidak/kurang memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi, lebih dari 20% penduduk belum memiliki fasilitas air minum dan sanitasi (4) diutamakan desa/kelurahan yang belum mendapatkan proyek sejenis dalam dua tahun terakhir (5) masyarakat desa/kelurahan ikut berkontribusi dalam pembangunan yang berupa material dan tenaga yang kira-kira sebanding dengan 16% dari total biaya serta dana tunai sebesar 4% dari total biaya (6) ada kesanggupan masyarakat membayar iuran untuk biaya operasional dan pemeliharaan. (Buku Pedoman Pamsimas, 2009)

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah



penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50% pada tahun 2015. Berdasarkan UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal yang rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan financial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia. (Buku Pedoman Pamsimas, 2009)

Program Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. (Buku Pedoman Pamsimas, 2009)

Suatu program penyediaan air minum, sanitasi kesehatan akan efektif dan berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya dan miskin) dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Proyek yang tanggap terhadap kebutuhan berarti bahwa proyek menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat inginkan, bersedia untuk berkontribusi dan membiayai dan dapat mengelola dan memelihara sehingga terbentuk rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengelola secara suka rela. Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan dan melaksanakan. Mengoperasionalkan, memelihara dan memanfaatkan sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan dimasyarakat dan lingkungan sekolah.

Kegiatan Pamsimas ini akan memberikan gagasan dan motivasi kepada masyarakat dan mengutamakan keinginan dan kepentingan mereka. Maka hal terpenting dari kegiatan yang dilakukan tersebut adalah masyarakat miskin khususnya dan masyarakat keterbatasan air bersih umumnya bisa merasakan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan yang mendasar dalam pelayanan air bersih dan peningkatan kesehatan, sehingga mereka bisa lebih meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan nantinya.

Mengingat mekanisme penyelenggaraan program Pamsimas melalui pendekatan masyarakat dan partisipasi masyarakat, perlu kita perhatikan keberlangsungannya agar nantinya program tersebut tepat sasaran dan masyarakatpun merasa memiliki serta partisipasi masyarakat ini nantinya bisa membantu terwujudnya program yang tepat guna dan efisien.

Sumber dana kegiatan Pamsimas ialah bantuan pinjaman dari bank dunia yang nantinya akan di hibahkan kepada masyarakat melalui lembaga pemerintah PU (Pekerjaan Umum), yang didukung oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan, dimana periode kegiatan telah dimulai sejak tahun 2007 hingga 2012. Kegiatan ini dilakukan diseluruh Indonesia yang daerahnya merupakan daerah dengan kategori miskin (data BPS 2005), atau kesulitan mengakses air serta rendahnya angka kesehatan yang disebabkan oleh akses air (Buku Panduan Pamsimas, 2009).

Program Pamsimas merupakan lanjutan Program Proyek Air Bersih dan Sanitasi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (WSLIC-2), dimana program ini sudah berjalan sejak tahun 2000 di 8 provinsi 36 kabupaten 2.461 desa, dengan sumber dana bantuan pinjaman bank dunia. Berdasarkan wilayah cakupannya, program Pamsimas lebih besar cakupannya yaitu di 15 provinsi, 110 kabupaten, 5000 desa (1000 desa replikasi). Jumlah sumber dana yang digunakan oleh program Pamsimas antara lain; Bantuan pinjaman bank dunia US\$ 137,5 juta, sumber dana pemerintah pusat US\$ 52,3 juta, sumber dana pemerintah kabupaten/kota US\$ 48,9 juta kontribusi masyarakat US\$ 36,5 juta, total US\$ 375 juta. Jumlah dari dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pelayanan masyarakat yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (Buku Pedoman Kegiatan Pamsimas, 2009)



Komponen yang ikut serta dalam menyukseskan kegiatan program Pamsimas ialah; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, The World Bank. Kegiatan Pamsimas tidaklah didanai seutuhnya oleh donatur/pemerintah (Buku Petunjuk Pamsimas, 2009).

Berdasarkan hasil survey penulis di Kecamatan Pauh, Kelurahan Lambung Bukit mendapatkan bantuan program Pamsimas dimana total biaya persatuan kegiatan (desa/kelurahan) ialah; jumlah total dana keseluruhan 275 juta total dana yang digunakan dalam bentuk persentase 70 % dari bantuan dana, 10% dari APBD, 20% dari masyarakat (16% dalam bentuk kontribusi tenaga 4 % dana in-cash). Dana in-cash ialah salah satu syarat untuk menyatakan kesanggupan melaksanakan program Pamsimas tersebut +/- 11 juta rupiah, dimana dana ini dikumpulkan oleh salah satu masyarakat yang bernama Firdaus Jabar, sekaligus dialah menjadi pemuda pelopor untuk membantu melaksanakan program Pamsimas tersebut (wawancara langsung di Lapangan).

Dalam setiap proyek pelibatan masyarakat (miskin), perlu dimengerti adanya tahapan pembangunan dalam kaitannya dengan partisipasi yang dilakukan dengan melihat tahap inisiasi, tahap perencanaannya, dan tahap pelaksanaan hingga tahap keberlanjutan. Selain itu, keberhasilan partisipasi juga ditentukan oleh komunikasi yang efektif yang mencakup proses memahami program (kognitif), sikap menyetujui program (efektif), dan melaksanakan program (psikomotorik) sebagai bentuk pemahaman masyarakat terhadap program tersebut (Partowijoto, 2004).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan bantuan dalam hal pelayanan air bersih dan sanitasi yaitu program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Program ini dimulai dari Oktober 2009 hingga Juli 2011 masih dalam tahap pengerjaan fisik, namun sudah mendekati selesai.

Program Pamsimas ditujukan kepada masyarakat miskin, namun tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah keatas untuk mengakses air tersebut dengan cara mengupayakan pemasangan pipa dari kran

umum yang disediakan menggunakan dana pribadi sesuai prosedur. Di kelurahan Lambung Bukit untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi telah diadakan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kegiatan ini berorientasi kepada peningkatan kesehatan dan penyediaan air bersih yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kondisi wilayah kelurahan Lambung Bukit yang terletak diatas bukit dan terpencil menjadi faktor penyebab sulitnya akses air bersih bagi masyarakat, selain itu sanitasi dan cara buang hajat yang tidak sehat serta kebanyakan mereka lebih memilih mandi kesungai yang berada dipinggir kelurahan yang kurang baik untuk kesehatan. Air sungai tersebut merupakan sumber air irigasi di Kecamatan Pauh. Dari segi kebutuhan rumah tangga terhadap air bersih memang cukup sulit, untuk mendapatkan air masyarakat harus menggali sumur secara manual hingga sedalam 10 meter lebih. Sumur yang digali masyarakat tersebut hanya akan bertahan jika kondisi cuaca tidak kemarau, jika terjadi kemarau mak sumber air msyarakat akan terganggu dan menjadikan sungai sebagai alternatif sumber air baik untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya.

Di Kelurahan Lambung Bukit, diketahui bahwa dilokasi penelitian ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air dan sanitasi yang layak, terutama akibat faktor Geografis dan Topografi. Jarak tempuh untuk mendapatkan akses air bersih dan sarana sanitasi membutuhkan fasilitas dan teknologi yang tidak dimiliki oleh mayoritas penduduk. Hal tersebut dikarenakan dana keterampilan terbatas. Masyarakat di kelurahan Lambung Bukit tidak memiliki pekerjaan tetap dan mayoritas rumah tangga miskin atau RTM juga tiadak memiliki keterampilan khusus dan memiliki pendidikan yang rendah serta tergantung pada sektor pertanian.

Program Pamsimas ditujukan untuk mengatasi masalah kebutuhan air bersih dan sarana sanitasi yang melibatkan masyarakat langsung, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Program Pamsimas ini berbeda dengan program pemerintah lainnya, dimana syarat untuk mendapatkan program ini masyarakat wajib berpartisipasi sebanyak 20%, dimana bentuk partisipasi tersebut dibagi atas swadaya 16% dan dana sisa berbentuk uang cash sebanyak



4% (+/-Rp. 11.000.000,-) yang harus dibayar lebih awal sebelum program ini dijalankan.

Program Pamsimas membutuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya, tanpa partisipasi masyarakat program akan otomatis gagal. Program Pamsimas yang dimulai dari Oktober 2009 namun sampai saat ini belum juga rampung pengerjaannya, diramalkan bulan Mei 2011 sudah finish. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat disana kurang baik, dari kondisi di atas maka timbul beberapa pertanyaan dari penulis yaitu terdiri dari:

1. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program Pamsimas Nago Sati, Kelurahan Lambung Bukit, Kec. Pauh, Kota Padang.
2. Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas Nago Sati, Kelurahan Lambung Bukit, Kec. Pauh, Kota Padang.
3. Faktor terkait apa yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam program Pamsimas Nago Sati, Kelurahan Lambung Bukit, Kec. Pauh, Kota Padang.

Sesuai dengan pertanyaan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITAS BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)**

(Studi Kasus: Pamsimas Nago Sati Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang).

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang.
2. Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang
3. Mengetahui faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur terhadap suatu program partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah (penyelenggraan program) untuk

menentukan konsep pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian kasus ini.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kemiskinan

Ramainya pembahasan akan kemiskinan menunjukkan bahwa masalah akan kemiskinan belum terselesaikan, ibarat “wabah penyakit” yang sangat serius, kemiskinan itu merupakan suatu penyakit karena dalam kenyataannya hal ini akan melemahkan mental dan fisik manusia itu sendiri.

Lebih lanjut Astrid (1984), mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang diperhatikan dan ditanggulangi, karena hal tersebut menjadi beban dan penghambat pembangunan. Kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat (Pakpahan dan Soetatwo, 1993).

Kemiskinan antara lain ditandai dengan rendahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Lebih lanjut disebutkan jika ditinjau dari segi sebab akibat, maka orang miskin adalah mereka yang terbelit di dalam lingkaran ketidakberdayaan (Bappenas, 1993).

Kemiskinan biasanya dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan natural, dan kemiskinan relatif. Pengertian kemiskinan struktural merujuk pada situasi dimana fenomena kemiskinan disebabkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat untuk maju secara keseluruhan. Kemiskinan natural menggambarkan fenomena kemiskinan sebagai akibat dari miskinnya sumber daya alam yang menghidupi masyarakat. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang merujuk pada situasi komparatif antar kelompok dengan kelompok (Pakpahan dan Soetatwo, 1993).

Karena penyebab kemiskinan yang beragam, maka ciri-ciri kemiskinan masyarakat dan desa miskin ini akan beranekaragam pula. Prayitno dan Arsyad (1986), mengemukakan ciri-ciri penduduk miskin antara lain adalah sebagai berikut; (1) umumnya tidak memiliki faktor sendiri seperti tanah, modal, keterampilan dan pendapatan yang rendah, (2) mengalami kesulitan dalam memiliki akses produksi, (3) tingkat pendidikan pada umumnya rendah dan (4) umumnya adalah petani pekerja kasar disektor pertanian.

Disamping ciri-ciri penduduk miskin diatas, dalam penentuan apakah suatu wilayah itu miskin atau tidak dapat dilihat dari kondisi rata-rata rumah tangga miskin tersebut; (1) sebagian besar rumah tangga miskin hanya mempunyai satu orang pekerja dalam satu keluarga, (2) sebagian besar tinggal pada persyaratan kesehatan yang belum memenuhi syarat, (3) lahan yang relatif kecil, (4) tingkat pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar masih rendah, (5) rata-rata kerja lebih rendah jika dibandingkan dengan jam kerja rumah tangga tidak miskin, (6) status pekerjaan 70% adalah petani.

Asnawi (1993) menjelaskan ciri-ciri wilayah atau desa miskin adalah; (1) pendapatan perkapita wilayah pada atau dibawah garis kemiskinan, (2) persentase keluarga rawan gizi tinggi, (3) umur harapan hidup rendah.

Selanjutnya ditambahkan oleh Faisal (1984) bahwa perikehidupan dan penghidupan pada umumnya masih sangat memperhatikan. Masyarakat desa sering diidentikkan dengan garis belakang yang diliputi kemunduran, kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Keterbelakangan itu dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu; (1) dianggap sebagai keterbatasan sumber-sumber, (2) keterbelakangan dianggap sebagai keterlambatan dalam arti lingkaran setan statik (Static Vicious Circle), (3) hal itu dapat dipandang sebagai keterkaitan pada tradisi, (4) keterbelakangan dianggap sebagai akibat kesenjangan yang terjadi antara pihak kaya dan miskin.

Berbicara dan memahami kemiskinan akan lebih baik dikaitkan dengan upaya menghapus kemiskinan itu sendiri. Dengan pemahaman yang baik akan dapat memberi arah terhadap upaya penghapusan kemiskinan.

Upaya penghapusan kemiskinan tetap menjadi perhatian bahkan merupakan suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada tiga anggapan yaitu; (1) kemiskinan mutlak harus dihapuskan karena menimbulkan penderitaan bagi manusia, (2) kemakmuran seseorang tidak dapat dipenuhi, (3) harus ada saluran yang memadai untuk memindahkan seving dari orang kaya kepada orang miskin

Kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dipilah menjadi tiga kelompok yaitu : (1) kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberi dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk, (2) kegiatan yang secara langsung mengarah pada



peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran dan (3) kebijaksanaan khusus menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus (Sumodiningrat, 1996).

Gagasan tersebut mestinya disusun berdasarkan prioritas waktu dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama sebagai jangka pendek, merupakan suatu usaha untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh kemiskinan absolut, dengan jalan memindahkan sumber daya kepada mereka dalam jumlah yang memadai. Tahap kedua untuk jangka panjang, dilakukan dengan merancang kebijaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan strategi keswadayaan lokal.

Upaya penghapusan kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan penduduk miskin yang dilaksanakan melalui suatu proses pendidikan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip menolong diri sendiri. Penerapan prinsip menolong diri sendiri pada penduduk miskin sebagai unit produksi, mereka mesti punya akses pada sumber daya, mempunyai akses pada pasar tenaga kerja dan teknologi serta adanya kerangka kebijaksanaan dan keterlibatan kelembagaan di dalamnya.

Selain penerapan prinsip menolong diri sendiri, upaya pemberdayaan mesti dilandasi dengan kemampuan peningkatan pendapatan (*income generating capacity*). Ini berarti bahwa kebijaksanaan pananggulangan kemiskinan hendaknya mendukung dan menunjang perkembangan potensi masyarakat melalui peningkatan peran serta, produktifitas rakyat dan efisinsi, langkah ini perlu dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar (Sumodiningrat, 1996).

Upaya pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal dengan memberikan bantuan usaha berupa modal kepada penduduk miskin melalui pendekatan kelompok secara teknis memungkinkan, sebab semua komponen program seperti dana, pendamping, ide, teknologi dan bahkan pembentukan kelompok difasilitasi oleh pemerintah. Target program akan tercapai bila semua komponen program berjalan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ada (Andrison, 1998).

## 2.2. Program Pengentasan Kemiskinan

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Pertama* program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu antara lain berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti dibebaskan biaya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta dibebaskan biaya-biaya pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Faktor *kedua* yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri.

Pemberdayaan terhadap sumber daya produktif berkaitan dengan upaya untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya tersebut bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Firdaus (1997) menyimpulkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya pemanfaatan sumber daya produktif meliputi kendala-kendala dalam hal kapital, kualitas sumber daya manusia, teknologi, prasarana serta sarana infrastruktur perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah sudah saatnya mengarahkan pembangunan sumber daya manusia kearah pemberdayaan masyarakat itu sendiri dengan memperhatikan modal usaha, meningkatkan produktifitas usaha kecil menengah yang kuat dan mandiri melalui



pembinaan dan pendampingan serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat.

Sumodiningrat (1996) menyatakan indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Berkurangnya penduduk miskin yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, berkembangnya kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan kapasitas masyarakat.
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya serta kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok makin kuatnya permodalan kelompok dan makin rapinya sistem administrasi kelompok.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran, kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kesenjangan antar wilayah, persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan, pengkapasitasan, dan pendayaan (Tim Kornas, 2008).

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) hadir sebagai program pemungkas pada krisis dengan sasaran yang lebih khusus meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pemantapan kelembagaan usaha. Dengan itu pula program ini dapat dilihat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin. (Tim Kornas, 2008).

Perluasan JPS dan pemberdayaan masyarakat meliputi perluasan Jaringan Pengaman Sosial (JPS), prasarana pedesaan, pengembangan ekonomi masyarakat di daerah, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE),



Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Pengangguran Tenaga Kerja Terampil (P3T), Program Padat Karya Kehutanan, Program Padat Karya Sektor Ciptaan Karya.

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan keberlanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Diantara keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat (Tim Kornas, 2008).

Pada tahun 2006 muncul kegiatan penyediaan air bersih dan peduli kesehatan masyarakat berbasis masyarakat, diperuntukan kepada golongan miskin dan susah terhadap akses air bersih, dinamakan Pamsimas. Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dan dunia terhadap masyarakat miskin dan masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih.

### **2.3. Ruang Lingkup Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)**

Kegiatan Pamsimas ini memberikan gagasan dan motivasi kepada masyarakat dan dapat mengutamakan keinginan dan kepentingan mereka. Maka hal terpenting dari kegiatan yang dilakukan tersebut adalah bagaimana proses penyampaian, bagaimana interaksi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan (masyarakat). Interaksi tersebut tergantung dari sistem sosial budaya masyarakat setempat termasuk latar belakang dari sasaran program yang dilakukan, karena itu sangat dibutuhkan komunikasi yang sangat efektif agar tujuan dari program dapat tercapai.

Program Pamsimas merupakan lanjutan Program Proyek Air Bersih dan Sanitasi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (WSLIC-2), dimana program ini sudah berjalan sejak tahun 2000 di 8 provinsi 36 kabupaten 2.461 desa, dengan



sumber dana bantuan pinjaman bank dunia, program Pamsimas lebih besar cakupannya yaitu di 15 provinsi, 110 kabupaten, 5000 desa (Sumber Buku Pedoman Pamsimas).

Program Pamsimas bertujuan untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai Sasaran Millenium Development Goals (MDGs). Sasaran itu diantaranya mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan pada tahun 2015 atau sebanyak 70 juta jiwa untuk cakupan pelayanan sanitasi dan 36 juta jiwa untuk cakupan pelayanan air minum terhadap 5000 desa dan akan dilaksanakan selama 5 tahun dengan dana pinjaman dari Bank Dunia dan diharapkan dapat dimulai pada tahun anggaran 2006. Ada lima komponen dalam program Pamsimas yaitu; (1) komponen pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan, (2) komponen kesehatan, higiene dan sanitasi, (3) komponen penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, (4) komponen pengembangan produktivitas desa, (5) komponen proyek.

Komponen lembaga yang ikut serta dalam mengsucceskan kegiatan program Pamsimas ialah; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, The World Bank, kegiatan Pamsimas tidak didanai seutuhnya oleh donatur / pemerintah (buku petunjuk Pamsimas).

Sesuai dengan tujuan program, kriteria pemilihan desa/kelurahan yang akan diikutsertakan dalam program Pamsimas adalah; (1) Desa/kelurahan yang diusulkan termasuk dalam kategori desa/kelurahan miskin berdasarkan hasil survey BPS 2004, (2) desa/kelurahan yang diusulkan mempunyai prevalensi penyakit terkait air yang tinggi seperti angka kejadian diare diatas 1.27 % per tahun, (3) desa/kelurahan yang tidak/kurang memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi, lebih dari 20% penduduk belum memiliki fasilitas air minum dan sanitasi. (4) Diutamakan desa/kelurahan yang belum mendapatkan proyek sejenis dalam dua tahun terakhir. (5) Masyarakat desa/kelurahan ikut berkontribusi dalam pembangunan yang berupa material dan tenaga yang kira-kira sebanding dengan 16 % dari total biaya serta dana tunai sebesar 4 % dari total biaya. (6) Ada

kesanggupan masyarakat membayar iuran untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Dana yang di gunakan untuk pembangunan sarana air bersih adalah bantuan pinjaman dari bank dunia yang dihibahkan kepada masyarakat, dana yang disalurkan kepada masyarakat ialah tidak penuh 100% (+/- 275 juta), melainkan tiga (3) bagian antara lain 70% dari bank dunia, 10% dari APBN, 20% dari masyarakat {4% dana in-cash (tunai +/-11 juta), 16% dalam bentuk swadaya masyarakat}.

Pelaksana kegiatan ialah yang melakukan kegiatan tersebut yang bertanggung jawab atas kelangsungan program mulai dari tahap paling bawah hingga atas, adapun pelaksana kegiatan yang mengurus program tersebut di bagi atas beberapa bagian antra lain; bank dunia, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 % pada tahun 2015. Berdasarkan UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah, maka pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia.

### **2.3.1. Konsep Sanitasi Oleh Masyarakat (SANIMAS)**

Sanimas merupakan salah satu program pembangunan prasarana air limbah yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui antara lain: (1) Keberpihakan pada warga yang berpenghasilan rendah, dimana orientasi



kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada penduduk miskin yang bermukim di permukiman padat perkotaan berdasarkan kebutuhan, (2) Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan hasilnya, (3) Mendorong prakarsa lokal dengan iklim keterbukaan, dimana masyarakat menyampaikan permasalahan dan merumuskan kebutuhannya secara demokratis dan transparan, (4) Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan, (5) Keswadayaan, dimana kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan.

Pembiayaan Sanimas berasal dari berbagai sumber pendanaan, yaitu: dana pemerintah (APBN dan APBD), dana masyarakat (swadaya masyarakat), dan swasta/donor/LSM (Buku Pedoman Sanimas, 2006).

Dana yang di gunakan untuk pembangunan sarana air bersih adalah bantuan pinjaman dari bank dunia yang di hibahkan kepada masyarakat, dana yang disalurkan kepada masyarakat ialah tidak penuh 100% (+/- 275 juta), melainkan tiga (3) bagian antara lain 70% dari bank dunia, 10% dari APBN, 20% dari masyarakat {4% dana in-cash (tunai +/-11 juta), 16% dalam bentuk swadaya masyarakat}(Buku Panduan Pamsimas, 2009).

### **2.3.2. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana kegiatan ialah yang melakukan kegiatan tersebut yang bertanggung jawab atas kelangsungan program mulai dari tahap paling bawah hingga atas. Pelaksana kegiatan yang mengurus program tersebut di bagi atas beberapa bagian antara lain : bank dunia, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

## **2.4. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

### **2.4.1. Partisipatif**

Istilah partisipasi merupakan kata kunci dalam setiap program pembangunan masyarakat. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta,

keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Terdapat beberapa pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dikembangkan oleh para ahli diantaranya, menurut Uphoff (1992) dalam Nadjib (2003), partisipasi diartikan sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut dan ikut serta dalam mengevaluasinya.

Menurut Slamet *cit* Ashful (2007), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pertanian. Bank Dunia *cit* Ashful (2007), partisipasi sebagai suatu proses dimana berbagai pelaku (*stakeholder*) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif pembangunan, keputusan, serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap mereka. Menurut Junanto *cit* Ashful (2007), partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang menyediakan individu suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan merupakan komponen dalam proses keputusan yang demokratis. Menurut Partowijoto *cit* Ashful (2007), partisipasi dibatasi dimana pihak yang mempunyai kehendak, mengambil prakarsa atau bermaksud untuk melaksanakan sesuatu yang baik yang datang dari pemerintah maupun publik (masyarakat, lembaga, kalangan swasta) mulai dari tahap awal (*inisiating*), perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementation*), sampai tahap berkelanjutan (*sustaining*), sedangkan menurut Sambroek dan Eger *cit* Ashful (2007) partisipasi merupakan suatu proses dimana seluruh pihak terkait (*stakeholder*) secara aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan.

Conyers dalam Slamet (1993) menyatakan bahwa seringkali kegiatan partisipatif terkendala oleh tidak adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan ada 2 (dua) faktor penting yang menentukan apakah seseorang memiliki keinginan untuk dilibatkan dalam perencanaan atau berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah; (1) Hasil dari keterlibatan dalam kegiatan tersebut. Orang tidak akan berpartisipasi secara antusias di dalam perencanaan bila dia merasa bahwa



partisipasinya tidak mempunyai akibat yang bermakna dalam rencana-rencana final (2) Kepentingan khusus secara langsung terhadap kegiatan tersebut.

#### **2.4.2. Konsep Partisipasi Masyarakat**

Menurut Ban dan Hawkins (1999), partisipasi memiliki konotasi yang berbeda-beda untuk berbagai orang sebagaimana terumus pada pokok-pokok berikut; (1) Sikap kerja sama petani dalam pelaksanaan program penyuluhan dengan cara menghadiri rapat-rapat penyuluhan, mendemonstrasikan metode baru untuk usaha tani, mengajukan pertanyaan kepada agen penyuluh, dan sebagainya (2) Pengorganisasian kegiatan-kegiatan penyuluhan oleh kelompok-kelompok petani, seperti pertemuan-pertemuan tempat agen penyuluhan memberikan ceramah, mengelola kursus-kursus demonstrasi, menerbitkan surat kabar tani yang ditulis oleh agen penyuluhan dan peneliti untuk petani, dan sebagainya (3) Menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan program penyuluhan yang efektif (4) Petani atau para wakilnya berpartisipasi dalam organisasi jasa penyuluhan dalam pengambilan keputusan mengenai tujuan, kelompok sasaran, pesan-pesan dan metode, dan dalam evaluasi kegiatan (5) Petani atau organisasinya membayar seluruh atau sebagian biaya yang dibutuhkan jasa penyuluhan (6) Supervisi agen penyuluhan oleh anggota dewan organisasi petani yang memperkerjakannya.

Menurut Ban dan Hawkins (1999) partisipasi dibedakan dalam 3 tingkatan yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, dalam tahap pelaksanaan, dan partisipasi dalam tahap evaluasi. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target.

Partisipasi dalam tahap pembangunan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto, 2009).

Kegiatan pemantauan atau evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2009).

Manfaat berpartisipasi bagi petani adalah; (1) Menjadikan petani sebagai penerima pertama teknologi yang akan dikembangkan. Partisipasi petani telah terjadi sejak perancangan hingga pelaksanaan pengkajian. Selama proses pengkajian petani dibimbing dan dilatih. Sebagai penerima pertama, petani koperator ini diharapkan menjadi motivator dan mitra kerja penyuluh dalam proses penyebarluasan teknologi tersebut, (2) Membuka kesempatan bagi petani untuk belajar memahami teknologi yang dikembangkan. Interaksi antara petani, peneliti dan penyuluh mendorong petani berpikir secara sistimatis dan analitis dalam memahami permasalahan usaha taninya, (3) Meningkatkan rasa percaya diri petani. Keyakinan terhadap hasil penerapan teknologi, menumbuhkan pula rasa percaya atas kemampuan diri petani itu sendiri, (4) Mendorong partisipasi petani sebagai pelaku pembangunan pertanian. Petani yang memiliki rasa percaya diri akan berpartisipasi secara mandiri dalam setiap program pembangunan pertanian (BPTP Ungaran, 1999).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program. Sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program, namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program, misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Ross dalam Sacha (2008) mengatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh keadaan perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Dari berbagai penjelasan dan uraian diatas, maka yang dimaksudkan dengan partisipasi masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul akibat kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, serta berminat untuk bergerak dalam pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan
2. Partisipasi dapat menumbuhkan saling pengertian, kebersamaan antara golongan dalam masyarakat
3. Partisipasi dapat mengembangkan keterampilan bagi masyarakat
4. Partisipasi mencerminkan seseorang tidak lagi sebagai objek didalam masyarakat, melainkan sebagai subjek yang turut bertanggung jawab dalam pembangunan.

#### **2.4.3. Syarat Tumbuh Partisipasi**

Slamet (2003) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: (1) Adanya kemauan dari dalam diri masyarakat untuk berpartisipasi, (2) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, (3) Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi

Lebih rinci Slamet menjelaskan tiga persyaratan yang menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi adalah sebagai berikut:

##### **a. Kemauan**

Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi, ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat, yang menyangkut: (1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, (2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya, (3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri, (4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan



tercapainya tujuan pembangunan, (5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

**b. Kemampuan**

Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik itu antara lain adalah: (1) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, (2) Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, (3) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki.

**c. Kesempatan**

Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh: (1) Kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, (2) Kesempatan untuk memperoleh informasi, (3) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya, (4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna, (5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan, (6) Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## **2.5. Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Pendekatan pembangunan partisipatif merupakan reaksi terhadap pembangunan yang dilaksanakan dengan cara-cara sentralistik dan birokratis yang lebih menekankan hasil dibanding proses pembangunan. Menurut pandangan para penganjur pembangunan partisipatif, pembangunan yang dilakukan secara sentralistik dan birokratis disadari sangat mengurangi kebebasan masyarakat serta hak-hak mereka untuk mengatur diri mereka sendiri (Tanjung. faidil 2001).

Pembangunan partisipatis yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri, melalui pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Apabila program berupa padat karya, pengerahan massa (mobilisasi) sangat diperlukan untuk merencanakan pembangunan yang akan dilakukan. Karena pada prinsipnya, perencanaan

pembangunan partisipatif memberi kemudahan untuk mengevaluasi kegiatan dengan melibatkan masyarakat maupun lembaga yang berkepentingan di dalam masyarakat itu sendiri. Disamping itu, perencanaan pembangunan partisipatif mengacu pada permasalahan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan fakta, dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknis, ekonomi dan sosialnya, untuk keberlanjutan pembangunan dimasa yang akan datang (Cahyono, 2006).

Sesuai dengan paradigma pembangunan yang baru, perencanaan (program) partisipatif menjadi kebutuhan mendasar dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan, dimana hasil-hasil pembangunan itu sendiri ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak pembangunan. Maka sudah selayaknya apabila masyarakat (stakeholders), dilibatkan sejak tahap awal hingga masyarakat menikmati hasil pembangunan tersebut (Nuwirman, 2003).

Berbagai pengalaman pembangunan daerah menunjukkan bahwa tanpa partisipasi masyarakat akan mengakibatkan; (1) pemerintah daerah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakatnya (2) investasi yang ditanamkan di daerah tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan masyarakat (3) sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal (4) sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat daerah tidak tertangkap (5) standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana yang tidak tepat (6) fasilitas-fasilitas yang digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan di tempat-tempat yang salah (Sumarto, 2004).

## **2.6. Partisipasi Petani dalam Pembangunan Irigasi**

Irigasi mempunyai fungsi untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang diwujudkan dengan mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi melalui penyelenggaraan sistem irigasi yang meliputi kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 2005).



Pelaksanaan pembangunan sumber daya air melalui prasarana keirigasian yang dilakukan selama ini mempunyai kelemahan yang ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan cepat terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi, hal itu juga disebabkan oleh pendekatan dari atas kebawah (*top down*) di dalam pembangunan irigasi, tidak sesuai dengan sifat irigasi yang memiliki karakteristik sosio teknis (Perdana, 2002).

Ketika akhir tahun 1970-an disaat program revolusi hijau dicanangkan untuk memacu tingkat swasembada beras nasional, program di sektor irigasi juga merupakan salah satu paket yang dibiayai oleh hutang Bank Dunia. Pendekatan pembangunan yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat sangat jelas terjadi, pada masa itu. Banyak proyek irigasi daerah ditenderkan pada pihak swasta secara tertutup, bahkan tanpa membuka peluang kepada masyarakat setempat dalam pembangunan, maka peluang kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) besar sekali. Inilah faktor mengapa banyak sekali proyek irigasi rusak dan tidak bisa berfungsi mengairi sawah secara baik diberbagai daerah. Pendekatan yang *top-down* demikian tentu mengabaikan nilai partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proyek tersebut. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan organisasi tani yang dibentuk dalam rangka prasyarat pengucuran hutang Bank Dunia. Dalam prakteknya, P3A hanya dijadikan alat kepentingan Dinas Pengairan yang selalu melegitimasi datangnya hutang dan proyek (Perdana, 2002).

Kebijakan pengelolaan irigasi yang hanya ditangani pemerintah pada awalnya dapat memberikan dampak yang cukup baik, seperti tercapainya swasembada pangan pada tahun 1984. Namun keberhasilan tersebut tidak berkelanjutan mengingat dukungan prasarana irigasi banyak yang menurun kuantitas, kualitas maupun fungsinya, apalagi setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 2005).

Adanya perubahan sistim pemeritahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta semakin kompleknya permasalahan pengelolaan irigasi, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi dan diperkuat dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Deptan RI, 2005).

Partisipasi petani (P3A) dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi. Disamping itu, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dimaksudkan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sumarto, 2004).

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air. Dalam hal pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder dapat melibatkan peran serta masyarakat (petani), sesuai Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu, tenaga, material dan dana. Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diantaranya meliputi partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (Deptan RI, 2005).

Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Bentuk partisipasi petani dalam rehabilitasi jaringan irigasi meliputi partisipasi dalam tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Dalam rehabilitasi dan peningkatan irigasi, rancang bangun, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, upaya pelibatan petani diharapkan melalui P3A/GP3A/IP3A. Petani akan mengetahui manfaat dari kegiatan pembangunan



irigasi diwilayahnya, sehingga apabila mereka dilibatkan akan lebih efektif (Sumarto, 2004).

Dilain pihak, rehabilitasi prasarana jaringan irigasi harus dilakukan sebelum umur teknisnya dilampaui, hal itu disebabkan oleh pelaksanaan O dan P jaringan irigasi tidak sebagaimana diharapkan karena keterbatasan dana. Sumber daya manusia dan kelengkapan sistem irigasi serta petani pemanfaatan kurang dilibatkan pada tahap pembangunan sesuai dengan semangat pembaharuan, maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi dengan sistem nilai sebagai berikut; adanya penunjukan kesepakatan petani, pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanam padi, desentralisasi, debirokratisasi dan devolusi dalam pengelolaan irigasi demokratisasi, partisipasi, pemberdayaan petani, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan holistik serta satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan (Perdana, 2002).

## **2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Putra Idola (2008) tentang “analisa tingkat partisipasi petani dalam penyelenggaraan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang infrastruktur pedesaan (PKPS – BBM IP) tahun 2005 di kota solok di kec. Lubuk sikarah, kel. KTK . Mengungkapkan bahwa:

1. Proses partisipasi petani dalam penyelenggaraan PKPS – BBM IP dikelurahan KTK belum optimal, hal ini ditandai dari kegiatan sosialisai dan penyaluran dana masih di dominasi oleh pihak yang bekedudukan dalam program (tim pemerintah, LPMK KTK, dan pengurus P3A) dengan pilihnya prasarana irigasi sebagai prioritas pembangunan di kelurahan KTK sedangkan petani bertindak sebagai kelompok kerja kegiatan setelah direkrut oleh P3A setempat.
2. Penyelenggaraan program sesuai dengan prinsip-prinsip PKPS-BBM IP karena dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat namun partisipatif dukungan dan tanggung jawab terhadap program lebih mengarah pada mobilisasi kegiatan sehingga keterbukaan menyampaikan aspirasi keberlanjutan terhadap prasarana terbangun menjadi semu (sesaat dalam program) karena masih kurangnya

pengembangan prasarana terbangun dari petani dalam melestarikan hasil pembangunan.

3. Tingkat partisipasi petani terhadap program diketahui berada kategori pura-pura artinya negoisasi (musyawarah) yang dilakukan menghasilkan kesepakatan, dimana dana program untuk pembangunan irigasi dapat diterima oleh seluruh stakeholders (pemerintah dan masyarakat setempat) sedangkan petani sebagai pihak yang berpengaruh (pelaku) terhadap pemanfaatan prasarana tersebut bersikap pasif dan cenderung menerima walaupun belum tentu sesuai dengan aspirasinya karena hak dan legitimasi program dipegang oleh pihak yang memiliki kedudukan (penguasa) dalam program, pada akhirnya petani tetap mengharapkan bantuan dalam mengatasi persoalannya.

Mira Mardhatilla (2008), tentang “Studi Peranan Kelompok Tani Dalam Program Wisata Agro di perkampungan Budaya Betawi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program wisata Agro di Perkampungan Budaya Betawi diangkat pada tahun 2001. Perkampungan Budaya Betawi bermitra dengan 4 kelompok tani dan menghentikan kemitraan dengan kelompok tani pada tahun 2003. Program wisata Agro di Perkampungan Budaya Betawi masih berjalan sampai sekarang.
2. Peranan kelompok tani dalam menunjang program wisata agro adalah sudah berperan namun belum maksimal. pengelolaan perkampungan budaya betawi belum melakukan pembinaan terhadap kelompok tani dan anggota. Pembinaan dilakukan oleh dinas pertanian dan dinas terkait lainnya. Kelompok memfasilitasi wisata agro berupa usaha pembibitan tanaman hias, pembibitan tanaman buah-buahan, *landscape* (pertamanan dan tanaman hias), dan perkembangan home industry (bir pletok, jahe instan, jus belimbing, dodol betawi dan kue kering)



3. Keterlibatan anggota kelompok dalam program pengembangan wisata agro pada tahun 2006 berada dalam taraf yang rendah yaitu 36,4 %.
4. Dampak ekonomi terhadap usaha kelompok dan anggota dapat dilihat dari berkembangnya perekonomian masyarakat. Pada kelompok, usaha yang dulunya menyerap tenaga kerja, sekarang usaha tersebut bisa dilakukan sendiri. Pada anggota, dapat dilihat dari penambahan mata pencaharian anggota. Pertambahan mata pencaharian responden antara sebelum dan sesudah adanya kawasan yaitu sebanyak 61 orang atau 58,1% menjadi 92 orang atau 87,6% dan mata pencaharian sampingan sebanyak 40 orang atau 38,1%.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian telah dilakukan di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang. Penelitian ini dilakukan secara *purposive* (sengaja), pada lembaga Pamsimas bersekretariat di LKM Nago Sati, dengan alasan:

1. Merupakan kelurahan yang mendapat pembangunan air bersih dengan partisipasi masyarakat, umumnya masyarakat di sekitar adalah masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap dan mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, serta masyarakat tersebut susah mendapatkan air bersih.
2. Program dimulai sejak bulan oktober 2009 yang diramalkan bulan mei 2011 sudah selesai. Namun, sampai saat sekarang belum selesai juga.

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung semenjak surat izin penelitian dikeluarkan untuk turun lapangan oleh Fakultas Pertanian.

#### 3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*), studi merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Dengan studi kasus ini memungkinkan untuk memberikan gambaran atau mendapatkan informasi yang lebih mendetail tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat, di kelurahan Lambung Bukit. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan (Nazir, 2003).

#### 3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) populasi penerima program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit di RW II pada RT 01 dan 02 yang terdiri dari 393 keluarga. Menurut Surachman (1982), pengambilan jumlah sampel ditentukan apabila jumlah populasi  $< 100$  maka sampelnya 50%, tetapi apabila jumlah populasi berkisar 100-1000 maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 15-50 %. Apabila lebih dari



1000 maka sampel diambil sebanyak 10-15 %. Banyak sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 responden yaitu 15% dari jumlah seluruh populasi yang mendapat bantuan program pamsimas.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka penjabaran jumlah responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Table 1. Daftar Nama Responden Partisipasi Masyarakat Lambung Bukit

NO	Nama	Umur	Status perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat
1	Amiruddin	60	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
2	Nuraini	55	Sudah	P	RT 001 RW 002
3	Yubir	42	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
4	Mardaleni	38	Sudah	P	RT 001 RW 002
5	Editiawarman	41	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
6	Daryetti	36	Sudah	P	RT 001 RW 002
7	Nahar	50	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
8	Yulita	43	Sudah	P	RT 001 RW 002
9	Irman	50	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
10	Yulidar	44	Sudah	P	RT 001 RW 002
11	Devi putra	24	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
12	Dewita irma sari	23	Sudah	P	RT 001 RW 002
13	Yusrinaldi	31	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
14	Irma novita	31	Sudah	P	RT 001 RW 002
15	Anas ashari	43	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
16	Syafriani	34	Sudah	P	RT 001 RW 002
17	Amril jamin	51	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
18	Busra narus	42	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
19	Devi andrita	42	Sudah	P	RT 001 RW 002
20	Dedi saputra	35	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
21	Feniza	34	Sudah	P	RT 001 RW 002
22	Yubardi	47	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
23	Erizayenti	41	Sudah	P	RT 001 RW 002
24	Nuraflis	42	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
25	Syamsidar	39	Sudah	P	RT 001 RW 002
26	Yardi	45	Sudah	Lk	RT 001 RW 002
27	Irman	51	Sudah	Lk	RT 002 RW 002
28	Awarlis	45	Sudah	P	RT 002 RW 002
29	Ermi	52	Sudah	Lk	RT 002 RW 002
30	Eni Ermi	42	Sudah	P	RT 002 RW 002
31	Yurnalis	42	Sudah	P	RT 002 RW 002
32	Armilan	30	Belum	Lk	RT 002 RW 002
33	April Dinata	22	Belum	Lk	RT 002 RW 002
34	Gusrialdi	28	Belum	Lk	RT 001 RW 002
35	Metra	26	Belum	Lk	RT 001 RW 002

Tabel 1. (Sambungan)

36	Masdar	29	Belum	Lk	RT 002 RW 002
37	April Dinata	22	Belum	Lk	RT 002 RW 002
38	Tomi Basri	27	Belum	Lk	RT 002 RW 002
39	Endri	29	Belum	Lk	RT 002 RW 002
40	Gurialdi	28	Belum	Lk	RT 002 RW 002

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara langsung. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yaitu petugas Pamsimas Nago Sati, Lurah Lambung Bukit, Ketua LKM Nago Sati, Pemuda Pelopor Kelurahan Lambung Bukit dan responden 40 orang anggota masyarakat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 2. Informan Kunci

No	Informan Kunci	Jumlah (orang)
1	Petugas PAMSIMAS Nago Sati	1
2	Lurah Lambung Bukit	1
3	Ketua LKM Nago Sati	1
4	Pemuda Pelopor Kelurahan Lmbung Bukit	1
	Jumlah	4

#### b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan berupa dokumen administrasi penyelenggaraan program Pamsimas yang diperoleh dari instansi/dinas kota Padang serta lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan program Pamsimas

### 3.5. Variabel yang Diamati

Topik penelitian yang diperlukan untuk menjawab tujuan pertama penelitian yaitu mendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dikelurahan Lambung Bukit kota Padang.



**a. Tahap Perencanaan, topik data meliputi:**

1. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan kegiatan, sub topiknya adalah: (a) siapa masyarakat yang terlibat dalam musyawarah perencanaan kegiatan (b) kenapa masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan kegiatan (c) dimana masyarakat melakukan musyawarah perencanaan kegiatan (d) kapan musyawarah perencanaan kegiatan dilaksanakan (e) bagaimana cara masyarakat melakukan musyawarah perencanaan kegiatan (f) apa yang dihasilkan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), sub topiknya adalah: (a) siapa masyarakat yang terlibat dalam pembentukan LKM (b) kenapa masyarakat dilibatkan dalam pembentukan LKM (c) dimana masyarakat melakukan pembentukan LKM; (d) kapan LKM dibentuk (e) bagaimana cara pembentukan LKM (f) apa yang dihasilkan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Pamsimas, sub topiknya adalah: (a) siapa masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi Pamsimas (b) kenapa masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi Pamsimas (c) dimana masyarakat melakukan sosialisasi Pamsimas (d) kapan sosialisasi Pamsimas dilaksanakan (e) bagaimana cara pelaksanaan sosialisasi Pamsimas (f) apa yang dihasilkan.

**b. Tahap Pelaksanaan, Topik data meliputi:**

1. Keterlibatan masyarakat dalam survey awal lokasi, sub topiknya adalah: (a) Siapa masyarakat yang terlibat dalam survey awal lokasi (b) Kenapa masyarakat melakukan survey awal lokasi (c) Dimana masyarakat melaksanakan survey awal lokasi (d) kapan masyarakat melaksanakan survey awal lokasi (e) bagaimana masyarakat melaksanakan survey awal lokasi (f) apa yang di hasilkan.
2. Keterlibatan msayarakat dalam realisasi rencana anggaran biaya (RAB), sub topiknya adalah: (a) siapa msayarakat yang terlibat dalam realisasi rencana anggaran biaya (b) kenapa kegitan realisasi rencana anggaran biaya dilakukan (c) dimana masayarakat merealisasikan RAB (d) kapan

masyarakat merealisasikan RAB (e) bagaimana cara masyarakat melaksanakan realisasi RAB (f) apa yang dihasilkan.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa, sub topiknya adalah: (a) siapa masyarakat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa (b) kenapa masyarakat dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa (c) dimana masyarakat dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa (d) kapan masyarakat melakukan pengadaan barang dan jasa (e) bagaimana cara masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa (f) apa yang dihasilkan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan bak penampungan, sub topiknya adalah: (a) siapa masyarakat yang terlibat dalam pembuatan bak penampungan (b) kenapa masyarakat dilibatkan dalam pembuatan bak penampungan (c) dimana masyarakat membuat bak penampungan (d) kapan pembuatan bak penampungan dilakukan (e) bagaimana cara masyarakat membuat bak penampungan (f) apa yang dihasilkan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam penggalian pipa saluran, sub topiknya adalah: (a) siapa masyarakat yang terlibat dalam penggalian pipa saluran (b) kenapa masyarakat dilibatkan dalam penggalian pipa saluran (c) dimana masyarakat melakukan penggalian pipa saluran (d) kapan penggalian pipa saluran dilaksanakan (e) bagaimana cara masyarakat melakukan penggalian pipa saluran (f) apa yang dihasilkan.
6. Keterlibatan masyarakat dalam penanaman pipa saluran, sub topiknya adalah: (a) siapa masyarakat yang terlibat dalam penanaman pipa (b) kenapa masyarakat dilibatkan dalam penanaman pipa saluran (c) dimana masyarakat melakukan penanaman pipa saluran (d) kapan masyarakat melakukan penanaman pipa saluran (e) bagaimana cara masyarakat melakukan penanaman pipa saluran (f) apa yang dihasilkan.
7. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan WC, sub topiknya adalah: (a) siapa masyarakat yang terlibat dalam pembuatan WC (b) kenapa masyarakat dilibatkan dalam pembuatan WC (c) dimana masyarakat melakukan pembuatan WC (d) kapan masyarakat melakukan pembuatan WC (e) bagaimana cara masyarakat pembuatan WC (f) apa yang dihasilkan.



**c. Tahap Evaluasi, Topik data meliputi:**

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kegiatan, sub topiknya adalah: (a) siapa masyarakat yang terlibat dalam evaluasi kegiatan (b) kenapa masyarakat dilibatkan dalam evaluasi kegiatan (c) dimana masyarakat mengevaluasi kegiatan (d) kapan masyarakat melakukan evaluasi kegiatan (e) bagaimana cara masyarakat melakukan evaluasi kegiatan (f) apa yang dihasilkan.

Untuk tujuan kedua mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas kelurahan Lambung Bukit yang diamati dapat dilihat pada Tabel 3.

Untuk tujuan **ketiga** yaitu mendeskripsikan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, yang diukur melalui indikator syarat tumbuh partisipasi adalah *Kemauan, Kemampuan dan Kesempatan*, variabel yang diamati adalah:

1. Karakteristik Masyarakat, meliputi:
  - a. Umur
  - b. Jenis Kelamin
  - c. Tingkat pendidikan
  - d. Pekerjaan.
2. Faktor terkait dalam masyarakat, meliputi:
  - a. Faktor sosial
  - b. Faktor ekonomi
  - c. Faktor budaya
  - d. Faktor alam

### **3.6 Analisa Data**

Langkah-langkah dalam analisa data sebagai berikut:

1. Proses partisipasi masyarakat kelurahan Lambung Bukit dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) keseluruhan data yang dikumpulkan dianalisa melalui wawancara langsung dengan informan kunci

yaitu; petugas Pamsimas Nago Sati , Lurah Lambung Bukit, ketua LKM Nago Sati, dan pemuda pelopor/tokoh masyarakat serta warga setempat.

2. Untuk mengukur tingkat partisipasi yaitu dengan pengamatan langsung dilapangan dan penyebaran kuisioner kepada responden dan pertanyaan terbuka, selain itu dibantu dengan data yang diperoleh secara kuantitatif. Untuk mengukur tingkat partisipasi tersebut ditentukan dengan memberi skor melalui penyebaran kuisioner kepada responden sebagai kategori jawaban yang dapat menjadi dasar pencapaian tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan. Untuk jawaban hadir dan ikut diberi skor 2 (dua), untuk jawaban ikut diberi skor 1 (satu) dan untuk jawaban rendah diberi nilai 0 (nol).

Tabel 3. Kriteria Skor untuk Masing-masing Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Lambung Bukit, Kec. Pauh, Kota Padang

No	Partisipasi Anggota	Skor
1.	Tahap Perencanaan	
	a. Musyawarah Perencanaan Kegiatan	
	• Hadir dan memberikan pendapat	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0
	b. Musyawarah pembentukan LKM	
	• Hadir dan memberikan pendapat	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0
	c. Sosialisasi Pamsimas	
	• Hadir dan memberikan pendapat	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0
2.	Tahap Pelaksanaan	
	a. Survey awal lokasi	
	• Hadir dan memberikan pendapat	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0
	b. Realisasi Anggaran Biaya (RAB)	
	• Hadir dan Merealisasikan Anggaran	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0
	c. Pengadaan Barang dan Jasa	
	• Hadir dan ikut pengadaan barang dan jasa	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0



Tabel 3. (Sambungan)

	d. Pembuatan Bak Penampungan	
	• Hadir dan ikut membuat bak	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0
	e. Penggalian Pipa Saluran	
	• Hadir dan ikut menggali saluran	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0
	f. Penanaman Pipa saluran	
	• Hadir dan ikut menanam pipa	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0
	g. Pembuatan WC	
	• Sudah memiliki WC	2
	• Sedang dibuat	1
	• Tidak sama sekali	0
3.	Tahap Evaluasi	
	a. Rapat evaluasi	
	• Hadir dan ikut memberikan pendapat	2
	• Hadir saja	1
	• Tidak sama sekali	0

Untuk menguji nilai skor yang diperoleh, ditentukan melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai rata-rata} = \sum Ni / n$$

Keterangan:

$Ni$  = Jumlah skor partisipasi  
 $n$  = Jumlah sampel

Berdasarkan nilai skor partisipasi dalam setiap kegiatan diatas,kemudian dipersentasikan dengan menggunakan rumus (Slamet, 2003):

$$\text{Tingkat Partisipasi} = \frac{\text{Total skor yang diperoleh}}{\text{Total skor maksimal}} \times 100\%$$

Sehingga persentase tingkat partisipasi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Partisipasi Tinggi, bila persentase yang diperoleh antara 68-100 %
- Partisipasi Sedang, bila persentase yang diperoleh antara 34-67 %
- Partisipasi Rendah, bila persentase yang diperoleh antara 0-33 %.

3. Faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), keseluruhan data yang dikumpulkan dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Dengan pengamatan langsung dilapangan melakukan wawancara terbuka mendalam, serta membandingkan informasi dari masyarakat yang bersangkutan dengan pedoman informan kunci.

### 3.7. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan untuk mengukur variabel penelitian (Nazir, 2003). Berdasarkan kerangka teori, konsep dan kerangka yang telah disajikan pada bagian tinjauan pustaka, maka penelitian ini menggunakan defenisi oprasional agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun defenisi itu adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dan ikut serta dalam pembangunan air bersih, pemeliharaan sarana dan prasana.
- b. Tahap Perencanaan adalah proses masyarakat berpartisipasi menghadiri dan memberikan informasi secara terbuka dalam suatu pertemuan atau musyawarah menyangkut permasalahan terhadap kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas.
- c. Tahap Pelaksanaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang telah disetujui bersama untuk merealisasikan hasil perencanaan hingga dilakukannya suatu kegiatan.
- d. Tahap Evaluasi adalah masyarakat kelurahan Lambung Bukit memberikan pendapat atau penilaian tentang keberhasilan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi kegiatan penilaian pada kegiatan perencanaan, penilaian pada kegiatan pelaksanaan, pada program Pamsimas.
- e. Kemauan adalah dorongan atau rangsangan yang berasal dari dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).



- f. Kemampuan adalah kapasitas responden melaksanakan berbagai tugas pekerjaan dalam Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), kemampuan responden tersusun dari dua perangkat yaitu; kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
- g. Kesempatan adalah kemauan dari pihak Pamsimas untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan air bersih dan memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

#### 4.1.1. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Lambung Bukit

Kelurahan Lambung Bukit adalah salah satu kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Pauh, Kota Padang. Secara geografis kelurahan Lambung Bukit merupakan dataran rendah yang landai, berbukit, berlembah dengan ketinggian 85m dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 22-32° C. Secara administratif batas-batas Kelurahan Lambung Bukit adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuranji

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kapalo Koto

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuranji

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok

#### 4.1.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Lambung Bukit pada tahun 2010 berjumlah 3.320 orang yang terdiri dari 1.744 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.576 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk tersebut tersebar dalam 3 RW dan 13 RT dan 764 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan Lambung Bukit

No	Nama RW	Kepala keluarga (KK)	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang )	Jumlah	Persentase (%)
1	RW 1	176	431	374	805	24
2	RW 2	393	893	801	1694	51
3	RW 3	195	420	401	831	25
	Jumlah	764	1.744	1576	3320	100

Sumber : Kantor Lurah Lambung Bukit (2010)

#### 4.1.3. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kelurahan Lambung Bukit adalah sebagai buruh, petani, swasta dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk di Kelurahan Lambung Bukit 2010

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri	22	2,24
2	TNI/ABRI	5	0,51
3	Polisi	2	0,2
4	Swasta	59	6,02
5	Tani	202	20,61
6	Wiraswasta	206	21,02
7	Buruh	237	24,18
8	Lain-lain	247	25,2
	Jumlah	980	100

Sumber : Kantor Lurah Lambung Bukit (2010)

#### 4.2. Identitas Responden dalam Partisipasi Pamsimas

Keadaan umum responden di daerah penelitian ini adalah seluruh yang berkaitan dengan responden yang terlibat dalam program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit ini. Responden terdiri dari anggota masyarakat yang berjumlah 40 orang. Identitas responden meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian pokok, dan jumlah anggota keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Identitas Responden dalam Partisipasi Pamsimas

No	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1	Jenis kelamin		
	a. Laki-laki	25	62.5
	b. Perempuan	15	37.5
2	Umur		
	a. 20 – 29	10	25
	b. 30 – 49	23	57.5
	c. > 50	6	15
	d. > 60	1	2.5
3	Pendidikan		
	a. SD	9	22.5
	b. SLTP	20	50
	c. SLTA	8	20
	d. Tidak sekolah	3	7.5
4.	Pekerjaan		
	a. Swasta	8	20
	b. Tani	15	37.5
	c. Wiraswasta	4	10
	d. Buruh	8	20
	e. IRT	5	12.5

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa tingkat umur responden pada kisaran umur 20 tahun hingga diatas 60 tahun. Diketahui tingkat umur 20-29 tahun yaitu 10 orang (25%). Pada tingkat umur 30-49 tahun yang merupakan sampel terbanyak yaitu 23 orang (57.5%), 50-59 tahun yaitu 6 orang (15%) dan tingkat umur diatas 60 tahun merupakan sampel terendah yaitu 1 orang (2,5%). Untuk jenis kelamin, jumlah perempuan lebih sedikit yaitu 15 orang sedangkan laki-laki 25 orang.

Dilihat dari segi tingkat pendidikan pada responden terdapat tamatan SD lebih banyak yaitu 9 orang (22.5%), tamatan SLTP terdapat 20 orang (50%). Sedangkan pada tamatan SLTA terdapat 8 orang (10%) dan yang paling terendah adalah Perguruan Tinggi yaitu 3 orang (7,5%).

Berikutnya dari segi pekerjaan masyarakat paling banyak responden menjadi petani sebanyak 15 orang (37,5%), wiraswasta sebanyak 8 orang (20%), buruh sebanyak 8 orang (20%) dan IRT (Ibu Rumah Tangga) sebanyak 5 orang (12,5%).

#### a. Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi tingkat pendidikan sebagian besar pendidikan masyarakat kelurahan Lambung Bukit belum cukup baik, karena dilihat dari tingkat mata pencaharian masih menjadi buruh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Tingkat Pendidikan di Kelurahan Lambung Bukit 2010

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang )	Persentase (%)
1	TK	476	14,33
2	SD	1249	37,62
3	SLTP	858	25.84
4	SLTA	699	21.05
5	D1-D3	23	0.69
6	S1-S2	15	0,45
	Jumlah	3320	100

Sumber : Kantor Lurah Lambung Bukit (2010)

#### 4.3. Sejarah Pamsimas

Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai keterkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadai



sarana dan prasarana air minum dan sanitasi khususnya diperdesaan dan daerah pinggiran kota (peri urban) berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga.

Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang baik memberikan dampak peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang baik. Ketiga dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.

Pamsimas adalah kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan bank dunia. Kegiatan ini didukung oleh departemen Pekerjaan Umum sebagai *executing agency* bersama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan.

Tujuan Pamsimas secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaaan dan pinggiran kota (peri-urban) serta menerapkan praktek hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. Program ini model untuk direplikasi, diperluas dan diharus utamakan di daerah lain.

Pamsimas merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yaitu *Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project* (WSLIC). Lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu; termasuk daerah miskin, rendahnya ketersediaan air minum dan sanitasi, tingginya kejadian penyakit terkait air dan belum menerima sejenis bantuan dalam dua tahun terakhir. Pemerintah menargetkan 15 provinsi, 110 kabupaten dan/kota, 4466 desa dan kelurahan untuk proyek ini termasuk program replikasi 506 desa. Dengan demikian, Pamsimas diharapkan mampu mencakup 4466 desa dari 36000 desa tertinggal yang memiliki keterbatasan terhadap sarana air minum dan sanitasi.

Di kelurahan Lambung Bukit, masyarakat pada umumnya adalah petani dan buruh, rata-rata penghasilan masyarakat adalah menengah kebawah, dan masih banyak yang tergolong tidak mampu. Dengan letak topografi kelurhan

Lambung Bukit yang di atas bukit, menjadikan kelurahan ini sangat susah mengakses air bersih dikarenakan fasilitas dan kemampuan terbatas. Ada beberapa masyarakat yang memiliki sumur, mereka harus melakukan penggalian sedalam lebih dari 10 meter. Jika datang musim kemarau atau tidak hujan selama satu minggu, maka sumur akan kering. Dengan kondisi seperti itu masyarakat menjadikan air sungai sebagai sumber air, baik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan lainnya, hal inilah yang membuat kesadaran warga untuk bisa memberdayakan air sungai tersebut.

Telah banyak usaha warga bersama pegawai kelurahan mencari bantuan agar kebutuhan masyarakat ini bisa dipenuhi, namun hal itu belum terjawab. Hingga pada awal tahun 2009 ada informasi tentang program Pamsimas yang berbasis masyarakat, hingga ada inisiatif seorang warga Lambung Bukit yang bernama Firdaus Jabar. Beliau sekaligus pemuda pelopor di kelurahan tersebut, dengan modal keberanian beliau pun mencari informasi tentang bagaimana syarat untuk dapat memperoleh bantuan tersebut. Pada bulan Juni 2009 diadakan rapat kelurahan dan beliau pun menyampaikan aspirasinya serta menyampaikan syarat untuk mendapatkan program tersebut adalah bentuk partisipasi masyarakat sebanyak 11 juta rupiah. Tanggapan masyarakat pun kurang baik, hingga diadakan usulan-usulan untuk mencari jalan keluar. Karena masyarakat merasa keberatan untuk memberikan dana sebesar 11 juta rupiah, dengan cara tidak langsung masyarakat tidak setuju. Hingga ditemukan satu solusi dengan cara meminjam uang kepada warga yang bernama Bapak Firdaus Jabar untuk menutupi dana tersebut. Namun setelah dana tersebut turun maka dana tersebut akan di potong langsung sebanyak Rp.11 juta, pendapat ini pun jadi keputusan bersama dan program pun mulai disetujui masyarakat hingga diadakanlah rapat selanjutnya pada bulan Juli 2009, yang hasilnya masyarakat Lambung Bukit menerima program tersebut.

Dalam program Pamsimas, untuk ketua LKM dipercayakan kepada bapak Firdaus Jabar, karena dianggap masyarakat Lambung Bukit beliau layak dan sudah terbiasa menjalankan program kelurahan seperti PNPM Mandiri dan lain-lain.



#### **4.4. Proses Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi**

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan. Dipihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat ke dalam proses pembangunan menunjukkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan (Mardikanto,2003).

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang terdapat di Kota Padang Kecamatan Pauh merupakan yang pertama kali yakni pada tahun 2009. Kelurahan Lambung Bukit yang berada pada Kecamatan Pauh merupakan salah satu kelurahan yang mendapat bantuan dari Pamsimas yaitu penyediaan sarana air minum dan sanitasi serta prilaku hidup bersih.

Selama kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi ada beberapa tahapan yang dilewati antara lain:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Evaluasi

##### **4.4.1. Tahap Perencanaan**

Perencanaan kegiatan dibutuhkan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur. Untuk masyarakat kelurahan Lambung Bukit juga melakukan perencanaan untuk melakukan kegiatan dalam program Pamsimas. Menurut Mardikanto (2009), mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Suatu kegiatan yang akan dilaksanakan akan dibuat perencanaan terlebih dahulu agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perencanaan haruslah tau apa dan bagaimana permasalahan yang ada, merumuskan secara bersama serta mengambil keputusan secara bersama sesuai kebutuhan orang banyak. Dalam tahap perencanaan ini, masyarakat

Lambung Bukit melakukan identifikasi masalah tentang kebutuhan yang mendasar serta dapat menunjang kehidupan masyarakat. Pada tahap ini dilaksanakan beberapa musyawarah yaitu:

**a. Musyawarah Perencanaan Kegiatan**

Telah diselenggarakan pertemuan atau musyawarah perencanaan kegiatan pada bulan juli 2009, pukul 21.00 s/d selesai di mushola Ainul Yaqin. Musyawarah dihadiri oleh Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh masyarakat dan masyarakat biasa serta petugas Pamsimas. Musyawarah ini dipimpin oleh Bapak Firdaus Jabar dari tokoh masyarakat dan narasumber oleh Bapak Ir. Melda Lisnadi dari DFC. Musyawarah perencanaan kegiatan merupakan pertemuan masyarakat di kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok/RT .

Materi atau topik musyawarah yang disampaikan oleh narasumber adalah tentang:

1. Pokok-pokok tentang Pamsimas meliputi; tujuan, prinsip, ketentuan dasar dan alur kegiatan Pamsimas yang akan dilakukan.
2. Permasalahan dan penyebab susah mengakses air bersih
3. Potensi dan sumberdaya lokal yang dimiliki.
4. Gagasan-gagasan kegiatan maupun visi kedepan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan penyebab susah mengakses air bersih, berdasarkan potensi dan sumberdaya lokal yang dimiliki.
5. Sumber dana awal in cash program Pamsimas

Hasil pembahasan dan diskusi terhadap 4 materi atau topik tersebut dalam musyawarah perencanaan kegiatan, dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Pada Tabel 8, terlihat bahwa program Pamsimas diterima oleh masyarakat dengan biaya awal (incash) dari peminjaman kepada Bapak Firdaus Jabar sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang pembayarannya diambil dari dana Pamsimas jika sudah turun. Musyawarah ini dihadiri oleh sebagian besar masyarakat kelurahan Lambung Bukit, mereka sangat antusias mendengar narasumber dari petugas Pamsimas, dan mereka pun mengharapkan program air bersih bisa dilaksanakan di daerah mereka.



Tabel 8. Kesesuaian Hasil Musyawarah Perencanaan Kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pamsimas

No.	Musyawarah Perencanaan Kegiatan	Petunjuk Pelaksanaan	Temuan dilapangan	Ket
1.	Topik	- Merumuskan tujuan kegiatan	-Kebutuhan SDM dan tenaga untuk pelaksanaan program pamsimas	Sesuai
		- Sumber dana Incash (sumbangan tunai masyarakat)	-Pinjaman dana dari bapak firdaus jabar Rp.11juta	Tidak sesuai
2.	Peserta	Peserta musyawarah - Petugas Pamsimas - Tokoh - Masyarakat	-DFC, Pamsimas -Lurah (Ermon) -Tokoh adat : Firdaus,Masyarakat RW II	Sesuai
3.	Tempat dan waktu	Harus disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat	Mushola Ainul Yaqin Pada bulan Juli 2009	Sesuai
4.	Hasil dari kegiatan	Masyarakat ikut terlibat atas dasar kesadaran dan mengeluarkan pendapat	Masyarakat memberikan pendapat dan bersedia ikut dan menerima program Pamsimas	Sesuai

Dari penjabaran Tabel 8, program ini tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program Pamsimas, karena dana incash bukan dari pinjaman atau dari dana lain melainkan dari sumbangan wajib warga yang menginginkan program Pamsimas. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak bersedia menyumbang dengan alasan tidak ada uang untuk sumbangan karena pada saat program disosialisasikan daerah tersebut dilanda gempa bumi yang mengakibatkan banyaknya rumah warga yang rusak. Jadi, warga lebih memilih memperbaiki rumah dari pada memberikan sumbangan untuk program Pamsimas, maka dari pada itu warga mensiasati dengan pinjaman dan membayar jika dana program Pamsimas sudah direalisasikan.

### b. Musyawarah Pembentukan LKM

Telah diselenggarakan pertemuan pembentukan LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) pada tanggal 28 september 2009, di Mushola Ainul Yaqin. Musyawarah ini dihadiri oleh Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh masyarakat dan masyarakat biasa serta petugas fasilitator Pamsimas. Musyawarah ini dipimpin oleh Bapak lurah Lambung Bukit dan narasumber oleh Bapak Roysyal Sinaga dari fasilitator Pamsimas. Pertemuan ini merupakan pembentukan organisasi masyarakat yang nantinya membantu mengkoordinasikan dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi agar bisa berjalan dengan lancar serta tepat sasaran, selain itu warga diharapkan LKM yang dibentuk dapat menjadikan tali penghubung dengan program Pamsimas.

Materi atau topik pertemuan yang disampaikan oleh narasumber adalah tentang:

1. Penilaian kelembagaan masyarakat yang ada
2. Persyaratan anggota LKM
3. Pendirian dan pemilihan anggota LKM

Hasil pembahasan dan diskusi terhadap 3 materi atau topik tersebut dalam pembentukan LKM , dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 9. Kesesuaian Hasil Kegiatan Musyawarah Pembentukan LKM dengan petunjuk pelaksanaan Pamsimas

No.	Musyawarah Pembentukan LKM	Jutlak	Temuan di lapangan	Ket
1.	Topik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan tujuan pembentukan LKM</li> <li>- Syarat keanggotaan</li> <li>- Legalitas LKM</li> <li>- Tata Kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian tujuan LKM</li> <li>- Syarat keanggotaan</li> <li>- Perencanaan pembentukan badan hukum</li> <li>- Rencana membuat badan hukum</li> <li>- Rencana strategis lembaga</li> </ul>	Sesuai



Tabel 9. (Sambungan)

2.	Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Petugas Pamsimas</li> <li>-Lurah Lambung Bukit</li> <li>-Tokoh Masyarakat</li> <li>-Masyarakat</li> <li>-Perwakilan masyarakat dari RT-RT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitator Roysal Sinaga</li> <li>- Lurah (Ermon)</li> <li>- Tokoh adat (Firdaus Jabar)</li> <li>- Masyarakat</li> <li>- Perwakilan RT-RT (Yusrial, Mawardi, Salamona, Satria Darma)</li> </ul>	Sesuai
3.	Tempat dan waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mudah di akses masyarakat</li> <li>-Tidak mengganggu kegiatan masyarakat. (hari libur/jadwal rapat masyarakat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mushola Ainul Yaqin</li> <li>- Minggu, 27 September 2009. Jam 21.00 WIB setelah sholat Isya.</li> </ul>	Sesuai
4.	Hasil kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dibentuk kepengurusan LKM</li> <li>-Diputuskan dan disahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuk LKM dengan nama LKM Nago Sati kepengurusan</li> <li>- Ketua : Firdaus Jabar</li> <li>- Staf : Yusrial</li> <li>- Anggota :Mawardi salamuna, satria darma</li> <li>- Diputuskan oleh warga dengan saksi warga dan petugas Pamsimas</li> </ul>	Sesuai

Dari hasil Tabel ditetapkan ketua dan pengurus LKM yang akan membantu mengkoordinasikan dengan warga dalam program Pamsimas dan disahkan oleh masyarakat Lambung Bukit, yang di beri nama LKM Nago Sati dan LKM ini pun didaftarkan ke notaris untuk melegalkan statusnya serta berbadan hukum, LKM yang dibentuk nantinya bisa membantu masyarakat dalam menjalankan program yang lain baik fisik dan non fisik.

#### c. Sosialisasi Pamsimas

Sosialisasi dilakukan oleh pihak Pamsimas yang diwakili oleh petugas Pamsimas yakni fasilitator Detia Delimas, ST sebagai fasilitator teknik. Sosialisasi

dilakukan pada tanggal 29 November 2009 seiring dengan registrasi data realisasi kontrak pekerjaan Pamsimas. Yang ikut dalam kegiatan ini adalah petugas Pamsimas kota padang, yakni:

1. TFM : Detia Delimas, ST
2. DFC : Ir. Melda Lisnadi
3. DMAC WSS : Ir. Syafrizal Mu'in
4. DMAC HH : Drs. Syahwal Azem, MM
5. PPK satker kota : Ir. Herman.

Sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat bagaimana program Pamsimas ini dijalankan dan apa saja yang perlu di perhatikan. Kegiatan ini dilakukan di mushola Ainul Yaqin bersama dengan masyarakat dan petugas LKM Nago sati, tokoh masyarakat dan ketua RT II kelurahan Lambung Bukit.

Kegiatan ini berlangsung pada pagi hari jadi tidak banyak warga yang hadir, namun telah diwakili oleh ketua RT mereka masing-masing di RW II. Nantinya, ketua RT inilah yang menyampaikan kepada warganya. Hasil dari sosialisasi ini ialah masyarakat yang hadir menyetujui adanya program dan pasrtisipasi terhadap program ini yang dipercayakan kepada LKM Nago Sati sebagai organisasi yang menjalankan program Pamsimas tersebut.

Hasil dari sosialisasi ini terbentuk Satlak (satuan pelaksana) yang dipimpin oleh LKM Nago Sati. Satlak ini bertugas khusus untuk pelaksanaan tugas dari LKM Nago Sati tentang pengerjaan program Pamsimas. Satlak yang di bentuk adalah:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| Ketua          | : Tasar        |
| Sekretaris     | : Yushernawati |
| Bendahara      | : Yendrawati   |
| Unit kesehatan | : Darmawi      |
|                | : Putri        |
|                | : Desi marlina |
| Unit Teknik    | : Raba'in      |
|                | : Junaidi      |



Mereka yang ditunjuk akan bersedia mendampingi program Pamsimas sampai selesai dan bertanggung jawab melaporkan penggunaan anggaran kepada LKM Nago Sati, serta LKM Nago Sati sebagai penanggung jawab penggunaan dana kepada pihak Pamsimas. Dalam pengambilan keputusan penetapan petugas Satlak ini di bentuk secara bersama (musyawarah) dan di putuskan secara bersama serta disahkan oleh LKM yang diketahui oleh petugas Pamsimas. Tujuannya agar di lapangan pekerjaan bisa cepat selesai dan tepat dalam penggunaan dana.

Tabel 10. Kesesuaian Sosialisasi Pamsimas dengan Petunjuk Pelaksanaan Pamsimas

No.	Sosialisasi Pamsimas	Petunjuk Pelaksanaan	Temuan dilapangan	Keterangan
1.	Topik	-Kebutuhan program -Pelaksanaan lanjutan program -Pengertian Hidup sehat	- Kebutuhan SDM dan tenaga untuk pelaksanaan program pamsimas - Pengenalan hidup sehat	Sesuai
2.	Peserta	-Petugas Pamsimas -Fasilitator -LKM -Masyarakat	-TFM -DFC -DMAC WSS -DMAC HH -PPK Satker -LKM Nago Sati -Satlak	Sesuai
3.	Tempat dan waktu	Harus disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat	-Mushalla Ainul Yaqin -SDN setempat  Minggu, 29 November 2009. Jam 10.00 WIB	Sesuai
3.	Hasil dari kegiatan	-Menyadarkan warga dan memberitahukan kepada warga tentang program pada tahap pelaksanaan -Memotivasi masyarakat dalam pembangunan sarana air bersih.	Masyarakat mengerti dan bersedia terlibat langsung dalam program Pamsimas	Sesuai

Pada tahap Sosialisasi Pamsimas, masyarakat dilibatkan dalam pembahasan tentang pembangunan sarana air bersih dan perilaku hidup sehat, tersebut baik di tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

#### **4.4.2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan penetapan sesuai dengan program Pamsimas usulan dan musyawarah serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Tahapan Pelaksanaan kegiatan pembangunan peyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat meliputi:

##### **a. Survey awal lokasi**

Survey awal dilakukan untuk melihat dimana sebaiknya dibangun sarana air minum, yang terdiri dari; bak penampungan, aliran pipa, kran umum, dan lahan siapa. Survey ini dilakukan pada tanggal 23 Februari 2010. Survey awal ini dilakukan oleh LKM Nago Sati, petugas Pamsimas, tokoh masyarakat, dan petugas kelurahan. Survey ini dilakukan secara bersama bertempat dekat dengan air sungai sungkai (sumber air), dengan hak milik masih masyarakat setempat dan telah dihibahkan untuk pembuatan bak penampungan karena lahan tersebut sangat cocok dan tinggi hingga mudah dalam penyaluran air ke warga nantinya.

Survey awal ini dilakukan bersama dengan penduduk RW II yang akan mendapatkan bantuan pelayanan air minum dan sanitasi. Untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam survey awal ini, petugas LKM Nago Sati memberikan info kepada RT-RT dalam RW II, mengenai survey awal. Maka ketua RT lah yang mengajak warganya untuk ikut dalam survey awal ini. Media yang digunakan dalam penyampaian pesan antara lain; elektronik (handphone), kertas pengumuman di warung-warung dan masjid/mushola, dan langsung ke rumah warga bagi yang susah di hubungi. Hasil dari survey ini di setujuinya tentang letak bangunan bak penampungan dan jalur pipa aliran air yang berjarak 500 m pertitik kran umum.

##### **b. Realisasi Anggaran Biaya (RAB)**

Dana yang digunakan dalam program pamsimas berjumlah total Rp.275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sumber dana ialah APBN 70% (Rp.192.000.000,-) APBD sebanyak 10% (Rp.27.500.000,-) dan



20 % (in cash 4% = Rp.11.000.000,- masyarakat dan 16% inkind), dana tersebut diataskan kepada LKM yang mengelola dan dicairkan dalam tiga tahap. Dana APBN yakni pada tahap I sebanyak 20% sejumlah Rp.38.500.000, tahap II sebanyak 40% sebanyak Rp.77.000.000,- dan tahap III sebanyak Rp. 77.000.000,- dengan total dana tersebut berjumlah Rp.192.000.000,-

Dana APBN di turunkan setelah dana SPPB I (APBD) sebanyak 10% dari total dana (APBD) dengan jumlah dana sebanyak Rp.27.500.000,-. Dana ini langsung diturunkan 100%. Barulah dana APBN (tahap II) di cairkan setelah kontrak kerja ditandatangani atau disetujui. Dan pihak masyarakat mengajukan surat kesanggupan kepada pihak Pamsimas.

Dalam penyaluran dana tersebut yang bertanggung jawab adalah pihak LKM, baik dalam pembelian barang maupun penggajian tukang harian, yang di bantu oleh satuan pelaksana (Satlak) bendahara wajib mencatat uang masuk dan realisasinya serta memberikan laporan kepada pihak Pamsimas melalui LKM Nago Sati. Laporan tersebut juga dipertanggungjawabkan juga kepada masyarakat dengan cara menempelkan di warung atau papan informasi mengenai laporan belanja atau uang masuk dan keluar untuk apa saja yang di pergunakan dengan uang tersebut.

Kegiatan ini dilakukan agar kecemburuan di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi serta tidak adanya penyalahgunaan anggaran. Masyarakat akan merasa puas tanpa harus bertanya kemana dana tersebut digunakan. Karena masalah tentang anggaran sangat sensitif di kalangan masyarakat apalagi tentang dana bantuan, sumber wawancara terbuka dengan firdaus jabar ketua LKM Nago Sati. Masyarakat disini memiliki dwi fungsi antara lain sebagai penyalur dan pengawas.

Kegiatan ini dilaksanakan di kelurahan Lambung Bukit RW II yang dimotori oleh masyarakat dan didampingi oleh Fasilitator Bapak Royslan Sinaga serta di pertanggung jawabkan oleh LKM Nago Sati yang di ketuai Bapak Firdaus Jabar serta di laksanakan oleh Satlak dengan Ketua Bapak Tasar. Adapun anggaran biaya yang disalurkan dapat di lihat pada tabel 11 berikut:

Dari tabel 11 disebutkan ada 5 kali penyaluran dana dengan dana in cash dari masyarakat sebanyak Rp. 11.000.000, dilanjutkan dana APBD sebanyak

Rp.27.500.00, di tutup dengan dana APBN sebanyak Rp.192.000.000, dengan tiga tahap penyaluran yakni 20% sebanyak Rp.38.500.000, dilanjutkan 2 kali 40% sebanyak Rp. 77.000.000. Dana tersebut dimulai dari masyarakat baru ke pihak kabupaten/kota setelah dana tersebut sudah direalisasikan barulah pihak pemerintah memberikan bantuan dana sisa dengan tiga tahap. Dalam kegiatan, masyarakat hanya sebagai penyalur dan pengawas. Dalam pengambilan dana bantuan dan penyimpan di percayakan kepada pihak LKM Nago Sati. Lampiran

Tabel 11. Kegiatan Realisasi Anggaran Biaya (RAB)

No	Tahap	Sumber dana	Tanggal penyaluran	Keterangan	Jumlah dana
1	Tahap I	Dana in cash	28 september 2009	Bentuk partisipasi awal (4%)	Rp. 11.000.000
2	Tahap II	Dana APBD	14 Desember 2009	Dana 10 % dari total proyek	Rp.27.500.000
3	Tahap III	Dana APBN Tahap I	29 Desember 2009	Dana 20% dari total anggaran APBN Rp.192.000.000	Rp.38.500.000
4	Tahap IV	Dana APBN Tahap II	29 juli 2010	Dana 40% dari total anggaran APBN Rp.192.000.000	Rp. 77.000.000
5	Tahap V	Dana APBN Tahap III	18 oktober 2010	Dana 40% dari total anggaran APBN Rp.192.000.000	Rp. 77.000.000

### c. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pamsimas ialah bentuk penyuplaian alat dan tenaga ahli serta penunjukan kepada pihak penyedia untuk menyediakan kebutuhan program tersebut dalam pembangunan sarana air bersih. LKM Nago Sati dipercaya untuk mencari barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang ditentukan dan jaminan tentang kesediaan barang. Disini masyarakat memantau tentang kebutuhan pembangunan sarana air bersih.

Dalam pengadaan barang dan jasa, pihak LKM Nago Sati tidak menunjuk perusahaan atau badan usaha dalam penyediaan barang, LKM Nago Sati membandingkan harga yang murah dan kualitas yang baik untuk pembangunan



sarana air bersih kecuali dalam penyediaan pasir pihak LKM langsung mengambil dari sumbernya dengan menyewa armada angkutan (truk).

Keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa ialah pada saat barang turun, maka masyarakatlah yang menurunkan dan mengawas dari truk pembawa barang yang di tumpukan di depan rumah Bapak Firdaus Jabar seperti pipa air, pasir, semen, dan besi serta alat-alat lainnya. Bentuk keterlibatan masyarakat disini sifatnya hanya sementara tidak terus menerus.

Dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih program Pamsimas, merupakan tujuan utama agar air bersih dapat dimanfaatkan, dalam pembangunan inilah yang sangat penting dan perlu ketelitian agar hasil yang diperoleh bisa maksimal dan baik. Selain waktu yang banyak diperlukan, tenaga dan pikiranpun sangat penting karena menyangkut pembangunan fisik.

Dalam pembangunan fisik Pamsimas Nago Sati Kelurahan Lambung Bukit meliputi:

#### **d. Pembuatan Bak Penampungan**

Pembuatan bak penampungan berfungsi untuk menjaga ketersediaan air untuk warga kelurahan Lambung Bukit. Dalam pembuatan bak dilakukan oleh warga laki-laki sedangkan perempuan menyediakan konsumsi. Dalam pemberitahuan sebelumnya semua warga yang masih memiliki tenaga untuk bekerja diwajibkan ikut serta dalam pembangunan bak penampungan karena memerlukan tenaga yang ekstra. Alat yang digunakan sekop cangkul, pengaduk semen, bak penampung pasir. Material yang digunakan pasir, semen, batu bata, besi, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 13 juli 2010 bertempat di kelurahan Lambung Bukit RW II, pengerjaannya lebih kurang satu minggu. Pekerjaan dimulai dengan pembersihan areal atau lahan dilanjutkan dengan penggalian pondasi hingga pembuatan dinding bak penampungan air bersih. Pekerjaan ini diawasi oleh fasilitator Pamsimas DFC Bapak Ir. Melda Lisnadi agar pembuatan bak penampungan sesuai yang diharapkan.

#### **e. Penggalian Pipa Saluran**

Kegiatan penggalian pipa saluran dilakukan oleh masyarakat yang umumnya dilakukan oleh laki-laki yang dilaksanakan pada tanggal 23 juni 2010. Alat yang digunakan cangkul, sekop, linggis, bak pengangkat pasir, dengan kedalaman

sesuai dengan lokasi tergantung kondisi di lapangan yang bentuk galiannya menurun agar tekanan air lebih kuat. Tujuan penggalian saluran adalah agar pipa yang ditanamkan bisa lebih tahan lama dan tidak mengganggu aktifitas warga nantinya. Kegiatan ini diawasi oleh fasilitator kelurahan Bapak Rosysal Sinaga agar galian pipa sesuai prosedur. Pada penggalian saluran pipa, konsumsi pekerja disediakan oleh perempuan. Saluran yang digali kurang lebih sepanjang 2 km, dikarenakan anggaran dana hanya sebatas itu saja.

#### **f. Penanaman Pipa Saluran**

Penanaman pipa dilakukan oleh masyarakat yang pada umumnya laki-laki dengan kedalaman +/- 30-50 cm. Alat yang digunakan yaitu; pengunci pipa, lem pipa, pemotong pipa. Material yang digunakan ialah pipa plastik 4 inchi, pipa besi inchi, keni 3 inchi (90), keni 3 inchi (45), stop kran 3 dan 4 inchi, senai pipa 3 dan 4, dobel nepal 3 dan 4 inchi, pipa wavin ½ puc. TBA, lem pipa. Dalam pembelian pipa ini dilakukan di toko Rahmalia pada tanggal 15 juli 2010, kegiatan ini dilakukan seiring dengan penggalian saluran pipa. Dalam pekerjaan penanaman pipa hingga saat sekarang masih 80% dalam penilaian Pamsimas rujukan laporan pekerjaan Pamsimas Nago Sati Kelurahan Lambung Bukit.

#### **g. Pembuatan WC Umum**

Pembuatan WC atau tempat pembuangan akhir kotoran manusia sangat penting untuk menjaga kebersihan dan menunjang kesehatan warga. Oleh sebab itu, pihak Pamsimas menganjurkan kepada warga tiap rumah memiliki sarana tersebut. Dalam Pembuatan WC sepenuhnya diserahkan kepada warga Kelurahan Lambung Bukit. Dalam wawancara dengan kepala RT pak Aliwar, beliau telah menyarankan kepada warganya untuk membuat WC di rumah sendiri. Hal ini di bantu di sosialisasikan oleh pihak Pamsimas yakni Defera nurdin, SKM. Hingga saat sekarang warga sudah banyak yang mengangsur pembuatan WC, karena mereka tidak bisa sekaligus dalam pembuatan terkendala masalah dana dan waktu.

#### **4.4.3. Tahap Evaluasi**

Setelah terputusnya kegiatan Pamsimas dikarenakan belum selesai maka masyarakat berkumpul untuk memusyawarahkan kesimpulan atau evaluasi kegiatan program Pamsimas yang telah dilaksanakan, Menurut Sumarto (2004) bahwa pada tahap evaluasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun



kelompok sosial organisasi mampu mengambil peran serta dalam melakukan penilaian suatu kegiatan secara lisan dan tulisan dan juga seperti yang dikatakan oleh Mardikanto (2009) bahwa kegiatan pemantauan atau evaluasi dalam suatu kegiatan sangat diperlukan, agar dapat melihat apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, dan juga kegiatan evaluasi diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. Evaluasi kegiatan Pamsimas dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Kesesuaian Evaluasi Kegiatan Pamsimas dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pamsimas

No.	Rapat Evaluasi	Petunjuk pelaksanaan	Temuan di lapangan	Ket
1.	Topik	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pertanggung jawaban progam Pamsiamas</li> <li>-Pertanggung jawaban dana</li> <li>-Keberlanjutan program pamsimas</li> <li>-Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pamsimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pembahasan sisa pelaksanaan kegiatan Pamsimas</li> <li>-Sisa dana tidak terjabar</li> <li>-Belum ada kejelasan lanjutan program Pamsimas</li> <li>-Permasalahan yang mendasar (Partisipasi masyarakat menurun)</li> </ul>	Sesuai
2.	Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Petugas Pamsimas</li> <li>-Fasilitator</li> <li>-LKM</li> <li>-Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lurah (Ermon)</li> <li>-Ketua Lkm Nago Sati (Firdaus Jabar)</li> <li>-Ketua RW II (Aliwar)</li> <li>-Satlak (sekretari)</li> </ul>	Tidak sesuai
3.	Tempat dan waktu	Mudah di akses seluruh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mushalla Ainul Yaqin</li> <li>-Senin , 19 November 2011. Jam 21.00 WIB</li> </ul>	sesuai
4.	Hasil Kegiatan	Ada laporan yang jelas dan tertulis dari LKM dan Satlak tentang pertanggung jawaban dana dan sisa lanjutan pekerjaan	Tidak ada loparan tertulis dari LKM Nago Sati tentang pertanggung jawaban dana dan sisa pekerjaan	

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dilihat dari kehadiran masyarakat pada saat rapat evaluasi dan memberikan pendapat atau saran, masyarakat yang ikut rapat evaluasi tetapi tidak memberikan pendapat, dan masyarakat yang tidak ikut rapat evaluasi. Dalam kegiatan ini hal-hal yang dievaluasi, yang pertama adalah penilaian pada tahap perencanaan, yang kedua penilaian pada tahap pelaksanaan, apakah materi yang telah direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya atau ada kendala lain.

Pada tahap evaluasi kegiatan Pamsimas tidak semua masyarakat hadir dalam rapat evaluasi. Pesan yang disampaikan tidak tertuju langsung kepada pokok masalah yang ada, begitu juga tidak hadirnya petugas dan masyarakat menjadikan rapat evaluasi tidak maksimal dan tidak ada penjelasan yang signifikan.

Evaluasi kegiatan dilakukan pada hari Senin tanggal 19 September 2011, yang hadir pada kegiatan ini adalah Lurah yang baru diganti yakni bapak Ermon, narasumber ketua LKM Nago Sati dan satlak sekretaris, anggota ketua RW dan RT, serta masyarakat biasa, yang hadir sangat sedikit dikarenakan ada perselisihan dikarenakan ada pergantian kepengurusan RT. Bagi yang bukan simpatisan ketua RT baru mereka tidak hadir. Yang dibahas dalam rapat evaluasi ialah:

1. Pengerjaan lanjutan kegiatan Pamsimas
2. Dana
3. Kepengurusan
4. Masalah internal dalam masyarakat
5. Rencana kerja kelurahan yang baru

Tahap evaluasi ini dilakukan atas inisiatif bapak lurah yang baru dengan ketua LKM untuk mencari titik temu masalah yang ada dan berharap akan selesai. Hingga komunikasi antar warga bisa berjalan lancar, jika ini terjadi apapun kegiatan yang dirumuskan secara bersama maka hasil akan lebih baik.

Hasil dari materi yang disampaikan antara lain dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

Dari hasil tabel 13 adanya perselisihan dan bergantinya kepengurusan membuat alasan warga tidak mau ikut dalam tahap evaluasi, hal ini lah yang menjadi terganggunya penyelesaian kegiatan program Pamsimas.



Tabel 13. Hasil Kegiatan Evaluasi Program Pamsimas

Topik	Hasil	Penilaian
1	Disampaikan lisan oleh ketua LKM nago sati.	a.Pembangunan air bersih Belum siap dan terbengkalai b.Belum ada wacana kedepan
2	Disampaikan oleh sekretaris Satlak. Dana tidak cukup lagi untuk sisa pengerjaan kegiatan program PAMSIMAS	a.Adanya devisit karena uang 11 juta dibayarkan untuk penggantian uang in-cash b. Mencari pinjaman sementara untuk penyelesaian program
3	Ketua LKM Nago Sati. Adanya kepengurusan yang perlu diperbaiki.	a.Pengurus satlak dan anggota LKM tidak berjalan dengan semestinya. b. Adanya Fasilitator yang keluar dari PAMSIMAS
4	Disampaikan oleh bapak Ermon kepala Lurah Lambung Bukit.	a.Adanya perselisihan antara simpatisan RT yang baru diganti b.Temu ramah antara kepala Lurah dengan warga kelurahan c.Belum ada kesepakatan kerja kelurhan
5	Disampaikan oleh bapak Ermon kepala Lurah Lambung Bukit.	a.Belum ada rencana kerja b.Tidak ada respon

#### 4.5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Kelurahan Lambung Bukit

Salah satu pendekatan dalam pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, menyangkut kebutuhan masyarakat setempat terhadap pelayanan infrastruktur yang dibangun. Untuk Kelurahan Lambung Bukit, dana yang diberikan oleh pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi di setiap tahapannya, dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Setiap Tahapan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

No.	Tahap penyediaan air minum dan sanitasi	Jumlah Skor	Skor yang Diharapkan	Partisipasi (%)
1	Tahap Perencanaan	157	240	65.42
2	Tahap Pelaksanaan	194	560	34.64
3	Tahap evaluasi	11	80	13.75
	Tingkat partisipasi			41.13
	Jumlah Skor	362	880	

Jumlah skor yang diperoleh dibagi skor yang diharapkan di kali 100. Jadi hasil yang di dapat ialah  $362 \div 880 \times 100 = 41.13\%$

Berdasarkan Tabel 14, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi berada pada kategori sedang bawah dengan persentase nilai sebesar (41.13%). Partisipasi masyarakat pada akhirnya bukan hanya sekedar bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, tetapi juga mengenai partisipasi itu sendiri melalui pembuatan model atau construct partisipasi. Jika terjadi suatu persamaan persepsi mengenai partisipasi masyarakat, maka dapat disusun indikator-indikator yang relatif ideal, yang dapat dipergunakan sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan di tiap daerah (Eng *et al*, 1986 dalam Idola, 2008).

Menurut Ban dan Hawkins (1999) partisipasi dibedakan dalam 3 tingkatan yaitu partisipasi dalam *Tahap Perencanaan*, dalam *Tahap Pelaksanaan*, dan partisipasi dalam *Tahap Evaluasi*. Dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatanya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target. Maka, pada tahapan tersebut dapat dijadikan indikator sebagai dasar untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi di Kelurahan Lambung Bukit yang dijelaskan seperti dibawah ini.

#### **4.5.1. Tahap Perencanaan**

Perencanaan kegiatan adalah proses pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui forum musyawarah terhadap usulan-usulan kegiatan pembangunan prasarana yang dibuat dan diajukan oleh masyarakat. Pada perencanaan terdapat tiga kegiatan musyawarah yang diikuti diantaranya: musyawarah perencanaan kegiatan, musyawarah pembentukan LKM , sosialisasi Pamsimas.



Tabel 15. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

No	Item Kegiatan	Jumlah (orang)	Skor diharapkan	Total Skor	Partisipasi (%)
1	Musyawarah Perencanaan kegiatan				
	a. Hadir, memberikan pendapat	30	80	65	81.25
	b. Hadir, tidak memberikan pendapat	5			
	c. Tidak hadir	5			
2	Musyawarah pembentukan LKM				
	a. Hadir, memberikan pendapat	25	80	60	75.00
	b. Hadir, tidak memberikan pendapat	10			
	c. Tidak hadir	5			
3	Sosialisasi Pamsimas				
	a. Hadir, memberikan pendapat	10	80	32	40.00
	b. Hadir, tidak memberikan pendapat	12			
	c. Tidak hadir	18			
	Tingkat Partisipasi				65.41
	Jumlah skor		240	157	

Dari hasil penelitian pada tahap perencanaan meliputi tiga item kegiatan yang dilakukan didapatkan persentase tingkat partisipasi (65.41%). Nilai ini berada pada kategori sedang atas. Banyaknya masyarakat yang tidak hadir disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya; sakit, adanya pekerjaan, tidak mendapat undangan dan adanya urusan lain yang sangat penting pada saat musyawarah dilakukan. Masyarakat yang datang dikarenakan ada pemberitahuan, selain itu masyarakat cukup patuh kepada ketua RT, jika ketua RT mengatakan untuk ikut kemungkinan mereka ikut sangat besar.

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto, 2001).

#### 4.5.2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musyawarah antar warga. Penetapan usulan dan musyawarah Pamsimas serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan ada delapan kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan jalan usaha tani yaitu: survey awal lokasi, Realisasi Anggaran Biaya (RAB), keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa, pembuatan bak penampungan, penggalian pipa saluran, penanaman pipa saluran, pembuatan WC umum. Untuk lebih jelasnya tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini:

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi tergolong pada kategori rendah atas, dimana persentase partisipasi masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi sebesar 30.31%.

Tabel 16. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (orang)	Skor diharapkan	Total Skor	Partisipasi (%)
1	Survey Awal Lokasi -Hadir, melakukan survey -Hadir, tidak melakukan survey -Tidak hadir	4 10 26	80	18	22.50
2	Realisasi Anggaran Biaya (RAB) - hadir dan ikut merealisasikan biaya - hadir tidak ikut - Tidak ikut sama sekali	0 5 35	80	5	6.25
3	Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengadaan Barang dan Jasa - hadir dan ikut - hadir - Tidak sama sekali	9 18 13	80	36	45.00
4	Pembuatan Bak Penampungan - hadir dan ikut - hadir - Tidak sama sekali	8 20 12	80	36	45.00



Tabel 16. (Sambungan)

5	Penggalian Pipa Saluran				
	- hadir dan ikut	20			
	- hadir	12	80	52	65.00
	- Tidak sama sekali	8			
6	Penanaman Pipa Saluran				
	- hadir dan ikut	5			
	- hadir	15	80	25	31.25
	- Tidak sama sekali	20			
7	Pembuatan WC Umum				
	- sudah ada	4			
	- sedang di buat	14	80	22	27.50
	- Tidak sama sekali	22			
Tingkat Partisipasi					34.64%
Jumlah			560	194	

Untuk tingkat Partisipasi jumlah total Partisipasi (%) atau jumlah skor yang diperoleh dibagi skor yang di harapkan  $\times 100 =$  Tingkat partisipasi

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi tergolong pada kategori sedang bawah, dimana persentase partisipasi masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi sebesar 34.64%.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Dilain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto, 2001).

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa pada survey awal lokasi, Realisasi Anggaran Biaya (RAB), keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa, pembuatan bak penampungan, penggalian pipa saluran, penanaman pipa saluran, pembuatan kran umum, pembuatan WC umum dibagi dalam dua kategori yakni hadir dan ikut dalam penyediaan air minumm dan sanitasi

masyarakat menjadi tenaga kerja. Dalam setiap pelaksanaan, ada pekerja tetap yang telah di gaji oleh pihak LKM Nago Sati sebanyak 3 orang dengan upah Rp.50.000,- per hari kegiatan dilaksanakan. Gaji mereka dimasukan dalam anggaran biaya, hal ini dilakukan karena atas kesadaran sendiri dan rasa memiliki terhadap penyediaan sarana air bersih tersebut. Di dalam juknis pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat yang menjadi pekerja dibayar tiap hari kerja. Akan tetapi, menurut Mardikanto (2003) partisipasi insentif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan tenaga atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah.

#### **a. Survey Awal Lokasi**

Masyarakat bersama LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dengan dibimbing oleh fasilitator Pamsimas melakukan survey dan pengukuran lokasi serta survey harga material. Bila masyarakat dan LKM sudah mampu, selanjutnya berdasarkan atas hasil survey dibuatkan desain, gambar teknis (rencana prasarana) atau rencana pelaksanaan kegiatan, dan RAB-nya. Proses pembuatan desain dan RAB tetap mengacu kepada kaidah dan spesifikasi teknis sehingga terjamin mutu kegiatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat pada survey awal lokasi berada pada tingkat partisipasi rendah yaitu 22.5%, didapat dari jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor yang diharapkan yakni  $18 \div 80 \times 100 = 22.5\%$

Berdasarkan penyebaran kuisioner, sampel yang hadir dan ikut memberikan pendapat sebanyak 4 orang (10%). Sedangkan sampel yang hadir saja, tidak ikut memberikan pendapat sebanyak 10 orang (25%), dan sampel yang tidak hadir sebanyak 26 orang (65%).

#### **b. Realisasi Anggaran Biaya**

Tingkat partisipasi masyarakat pada Realisasi Anggaran Biaya berada di tingkat rendah bawah 6,25%, didapat dari jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor yang diharapkan yakni  $5 \div 80 \times 100 = 6.25\%$  Berdasarkan penyebaran kuisioner, sampel yang ikut merealisasikan biaya sebanyak 0 orang (0%). Sedangkan sampel yang ikut menjadi hadir saja sebanyak 5 orang (12,5%) dan yang tidak ikut sama sekali sebanyak 35 orang (87.5%). Hal ini di sebabkan dalam realisasi anggran biaya sepenuhnya dipegang oleh pihak LKM, jadi



masyarakat hanya sekedar mengetahui saja. Agar tidak ada tumpang tindih nantinya jika dana tersebut diselewengkan dan tidak terjadi korupsi.

#### **c. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Adapun tingkat partisipasi masyarakat pada pengadaan barang dan jasa berada di tingkat sedang 45%, didapat dari jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor yang diharapkan yakni  $36 \div 80 \times 100 = 45\%$

Berdasarkan penyebaran kuisioner, sampel yang hadir dan ikut sebanyak 9 orang (22,5%). Sedangkan sampel yang hadir saja sebanyak 18 orang (45%) dan yang tidak ikut sama sekali sebanyak 13 orang (32,5%). Dalam pengadaan barang dan jasa masyarakat banyak terlibat hanya dalam penunjukan dan pengawas tempat pembongkaran barang yang di beli dari toko bangunan dan menentukan tempat pembelian barang dengan harga murah serta kualitas yang baik.

#### **d. Pembuatan Bak Penampungan**

Tingkat partisipasi masyarakat pada pembuatan bak penampungan berada di tingkat sedang 45%, didapat dari jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor yang diharapkan yakni  $36 \div 80 \times 100 = 45\%$ . Berdasarkan penyebaran kuisioner, sampel yang hadir dan ikut sebanyak 8 orang (20%) . Sedangkan sampel yang hadir sebanyak 20 orang (50%) dan yang tidak ikut sama sekali sebanyak 12 orang (30%). Dalam pembuatan bak penampungan, perempuan ikut serta dalam membantu konsumsi para laki-laki yang bekerja, karena hal ini yang bisa dilakukan para wanita. Yang tidak ikut merasa pekerjaan tersebut bukan keahlian mereka.

#### **e. Penggalan Pipa Saluran**

Tingkat partisipasi masyarakat pada penggalan saluran pipa berada di tingkat sedang atas 65%, didapat dari jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor yang diharapkan yakni  $52 \div 80 \times 100 = 65\%$ . Berdasarkan penyebaran kuisioner, sampel yang hadir dan ikut sebanyak 20 orang (50%). Sedangkan sampel yang hadir saja sebanyak 12 orang (30%) dan yang tidak ikut sama sekali sebanyak 8 orang (20%). Banyak masyarakat yang ikut dalam penggalan pipa ini disebabkan hubungan gotong royong pada saat itu masih tinggi dan disebabkan juga desakan kebutuhan air bersih.

#### **f. Penanaman Pipa Saluran**

Adapun tingkat partisipasi masyarakat pada penanaman pipa berada di tingkat rendah atas 31,25%, didapat dari jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor yang diharapkan yakni  $25 \div 80 \times 100 = 31.25\%$ . Berdasarkan penyebaran kuisioner, sampel yang hadir dan ikut sebanyak 5 orang (12,5%). Sedangkan sampel yang hadir saja sebanyak 15 orang (37.5%) dan yang tidak ikut sama sekali sebanyak 20 orang (50%). Hal ini disebabkan banyak yang tidak ikut bekerja dan banyak yang tidak hadir dikarenakan keahlian dalam penyambungan pipa tidak merata, selain itu alasan lain tenaga yang tidak banyak karena hanya memasukan pipa kedalam galian.

#### **g. Pembuatan WC**

Adapun tingkat partisipasi masyarakat pada pembuatan WC berada di tingkat rendah 27,5%, didapat dari jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor yang diharapkan yakni  $22 \div 80 \times 100 = 27.5\%$ . Berdasarkan penyebaran kuisioner, sampel yang sudah memiliki WC adalah sebanyak 4 orang (10%). Sedangkan sampel yang sedang membuat WC sebanyak 14 orang (35%) dan yang tidak memiliki sama sekali sebanyak 22 orang (55%). Dalam pembuatan WC kebanyakan warga mengupayakan sendiri pembuatan WC, dalam kategori sedang dibuat dikarenakan dalam pembuatan WC mereka mengangsur dalam pembuatannya, karena dana mereka pun terbatas.

### **4.5.3. Tahap Evaluasi**

Pada tahap evaluasi ini, masyarakat dilibatkan dalam hal tinjauan sementara tentang pengerjaan fisik pembangunan sarana air bersih dalam program Pamsimas. Namun, masyarakat banyak yang tidak datang dikarenakan tingkat kepedulian dan kesadaran sudah terkontaminasi dengan perselisihan antara RT, jadi hal ini yang membuat masyarakat enggan datang dan mersa segan jika bertemu.

Berdasarkan Tabel 17 berikut diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berada pada tingkat rendah bawah sebesar 13.75%. Dari tinjauan di lapangan, terlihat masyarakat yang ikut mengevaluasi kegiatan sangat sedikit. Hal ini dikarenakan program belum selesai dan ada perselisihan antar pengurus.

Tabel 17. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi pada Tahap Evaluasi

No	Item kegiatan	Jumlah (orang)	Skor	Total Skor	partisipasi (%)
	Evaluasi kegiatan				
	a. Hadir rapat dan ikut berpendapat	4	80	11	13.75%
	b. Hadir saja	3			
	c. Tidak ikut sama sekali	33			
	Persentase Tingkat Partisipasi				13.75
	Jumlah Skor yang diperoleh			11	
	Skor yang diharapkan		80		

#### 4.6. Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)

Dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) partisipasi masyarakat dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Dari tahapan tersebut diukur tingkat partisipasi masyarakat dan diketahui bahwa tingkatan partisipasi masyarakat berada pada partisipasi sedang dan partisipasi rendah.

Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan, yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan. Di samping itu, dengan melihat kesempatan, yang bersangkutan juga akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan (yang diperlukan) untuk dapat berpartisipasi. Slamet (2003) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok yaitu; 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Gambaran tingkat dan faktor-faktor partisipasi dapat dilihat pada Tabel 18 berikut:



4.6.1. Tahap perencanaan

Tabel 18.Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi pada Musyawarah Perencanaan Kegiatan dalam Program Pamsimas

No	Musyawarah Perencanaan Kegiatan	Hadir		Musyawarah Perencanaan Kegiatan	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Waktu luang	8	20	Tidak ada undangan	2	5
2.	Perintah ketua RT	20	50	Sakit	1	2,5
3.	Dapat undangan	7	17,5	Bekerja	1	2,5
4.				Merasa terwakili	1	2,5
J u m l a h		35	87,5		5	12,5

Berdasarkan Tabel 18, kehadiran masyarakat untuk mengikuti musyawarah tidak terlepas dari intruksi dari ketua RT, selain itu kesempatan mereka berhubungan dengan waktu luang, kemampuan masyarakat berhubungan dengan kondisi fisik. Ketidakhadiran masyarakat dikarenakan tidak ada undang, sakit, bekerja dan merasa sudah terwakili dari warga lain yang ikut dalam musyawarah perencanaan kegiatan.

Tabel 19. Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi pada Musyawarah Pembentukan LKM dalam Program Pamsimas

No	Musyawarah Pembentukan LKM	Hadir		Musyawarah Pembentukan LKM	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Waktu luang	13	32,5	Tidak ada undangan	1	2,5
2.	Dapat undangan	10	25	Bekerja	2	5
3.	Kondisi fisik kuat	3	7,5	Jarak yang jauh	2	5
4.	Keingintahuan	9	22,5			
J u m l a h		35	87,5		5	12,5

Berdasarkan Tabel 19, kehadiran masyarakat untuk mengikuti musyawarah didukung oleh kekuatan fisik dan keingintahuan masyarakat terhadap siapa yang menjadi pengurus LKM dan mendukung calon yang diusulkan, selain itu kesempatan mereka berhubungan dengan waktu luang, kemampuan masyarakat berhubungan dengan kondisi fisik. Ketidakhadiran masyarakat dikarenakan tidak ada undang, bekerja dan merasa sudah terwakili dari warga lain yang ikut dalam musyawarah perencanaan kegiatan.

Tabel 20. Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi pada Sosialisasi dalam Program Pamsimas

No	Sosialisasi Pamsimas	Hadir		Sosialisasi Pamsimas	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Waktu luang	3	7,5	Tidak ada undangan	5	12,5
2.	Dapat undangan	10	25	Bekerja	3	7,5
3.	Kondisi fisik kuat	2	5	Merasa terwakili	8	20
4.	Keingintahuan	7	17,5	Sakit	2	5
J u m l a h		22	55		18	45

Berdasarkan Tabel 20, kehadiran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi Pamsimas didukung oleh kekuatan fisik dan keingintahuan masyarakat terhadap apa yang menjadi kewajiban warga dan apa saja pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya, selain itu kesempatan mereka berhubungan dengan waktu luang, kemampuan masyarakat berhubungan dengan kondisi fisik. Ketidakhadiran masyarakat dikarenakan tidak ada undang, bekerja dan merasa sudah terwakili dari warga lain yang ikut dalam musyawarah perencanaan kegiatan.

Dalam tahap perencanaan yang menjadi faktor mendasar kedatangan warga ialah adanya kekuatan fisik dan patuh kepada komandannya (ketua RT) karena warga yang datang diwajibkan oleh ketua RT nya. Warga yang tidak datang merupakan warga (masyarakat biasa) dan yang menjadi halangan dikarenakan tidak mengetahui acara tersebut dan ada pula kendala fisik (sakit), bagi buruh pekerjaan dan mencari uang merupakan faktor yang menjadi halangan utama yang mendasar. Masyarakat biasa yang tidak hadir karena mereka merasa tidak di butuhkan dalam pengambilan keputusan, selain itu mereka merasa sudah terwakili oleh warga lain yang ikut dalam kegiatan tersebut.

#### 4.6.2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Tabel 21, kehadiran masyarakat untuk mengikuti survey awal lokasi karenakan ada undangan dan mempunyai waktu luang didukung oleh kekuatan fisik dan keingintahuan masyarakat terhadap lokasi pembuatan sarana air bersih dan apa saja pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, selain itu kesempatan mereka berhubungan dengan waktu luang, kemampuan masyarakat

berhubung dengan kondisi fisik. Ketidakhadiran masyarakat dikarenakan tidak ada undangan, bekerja dan merasa sudah terwakili dari warga lain yang ikut sosialisasi program

Tabel 21. Hasil Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Survey Awal Lokasi dalam Program Pamsimas

No	Survey Awal Lokasi	Hadir		Survey Awal Lokasi	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Waktu luang	4	10	Tidak ada undangan	6	15
2.	Dapat undangan	6	15	Bekerja	3	7,5
3.	Kondisi fisik kuat	1	2,5	Merasa terwakili	15	37,5
4.	Keingintahuan	3	7,5	Sakit	2	5
J u m l a h		14	35		26	65

Tabel 22. Hasil Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada RAB dalam Program Pamsimas

No	Realisasi Anggaran Biaya (RAB)	Hadir		Realisasi Anggaran Biaya (RAB)	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Waktu luang	1	2,5	Tidak ada undangan	5	12,5
2.	Dapat undangan	1	2,5	Bekerja	10	25
3.	Keingintahuan	3	7,5	Merasa terwakili	12	30
				Merasa bukan keahlian	8	20
J u m l a h		5	12,5		35	87,5

Berdasarkan Tabel 22, keikutsertaan masyarakat dalam merealisasikan anggaran biaya sangatlah minim. Ini terlihat dari jumlah masyarakat yang terlibat hanya 5 orang dari 40 orang responden. Masyarakat yang terlibat adalah orang-orang yang merasa ingin tau tentang realisasi anggaran biaya ini, disamping itu ketersediaan waktu dan adanya undangan juga mempengaruhi. Banyaknya masyarakat yang tidak hadir pada umumnya karena sedang bekerja, perasaan sudah terwakili oleh orang lain, tidak dapat undanga. Bahkan ada masyarakat yang merasa bahwa kegiatan ini bukan keahliannya. Tanpa disadari oleh masyarakat tersebut, bahwa tahapan pelaksanaan realisasi anggaran biaya sebenarnya bisa menjadi tambahan ilmu bagi masyarakat itu sendiri.



Tabel 23. Hasil Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Pengadaan Barang dan Jasa dalam Program Pamsimas

No	Pengadaan Barang dan Jasa	Hadir		Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Kepedulian	10	25	Tidak ada kepentingan	3	7,5
2.	Waktu luang	11	27,5	Bekerja	2	5
3.	Kondisi fisik kuat	1	2,5	Merasa terwakili	3	7,5
4.	Keingintahuan	5	12,5	Bukan keahlian	5	12,5
Jumlah		27	67,5		13	32,5

Berdasarkan Tabel 23, partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh ketersediaannya waktu dan kepedulian masyarakat akan pemenuhan kebutuhan air bersih. Keingintahuan masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang. Pada tahap ini, masyarakat cukup banyak terlibat yaitu >50% responden. Masyarakat yang tidak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak memiliki kepentingan, merasa telah terwakili oleh masyarakat yang terlibat serta ada yang merasa kalau dalam pengadaan barang dan jasa ini dia tidak ahli.

Tabel 24. Hasil Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Pembuatan Bak Penampungan dalam Program Pamsimas

No	Pembuatan Bak Penampungan	Hadir		Pembuatan Bak Penampungan	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Menyumbangkan tenaga dan fikiran	3	7,5	Tidak ada undangan	4	10
2.	Waktu luang	5	12,5	Bekerja	3	7,5
3.	Perintah dari RT	15	37,5	Merasa terwakili	3	7,5
4.	Keingintahuan	5	12,5	Sakit	2	5
Jumlah		28	70		12	30

Berdasarkan Tabel 24, partisipasi masyarakat dalam pembuatan bak penampungan lebih tinggi dibandingkan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ini terlihat dari jumlah partisipan yang ikut dalam kegiatan. Pada umumnya

masyarakat yang terlibat mendapat instruksi langsung dari ketua RT. Disamping itu, waktu luang dan keingintahuan tentang proses pembuatan bak penampungan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat yang tidak terlibat dalam proses ini adalah mereka yang tidak mendapatkan undangan, sedang bekerja, merasa terwakili dan ada beberapa warga yang sakit pada saat kegiatan berlangsung. Selain itu, faktor jenis kelamin juga mungkin mempengaruhi tingkat partisipasi pada tahap ini. Karena perempuan tidak ada satupun yang ikut dalam proses pembuatan bak penampungan maupun pembangunan fisik lainnya.

Tabel 25. Hasil Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Penggalan Pipa Saluran dalam Program Pamsimas

No	Penggalan Pipa Saluran	Hadir		Penggalan Pipa Saluran	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Waktu luang	5	12,5	Bekerja	3	7,5
2.	Perintah ketua RW	20	50	Merasa terwakili	4	10
3.	Kondisi fisik kuat	7	17,5	Sakit	1	2,5
J u m l a h		32	80		8	20

Pada proses penggalan pipa saluran, partisipasi masyarakat sangat tinggi, terbukti dari jumlah partisipan mencapai 75% dari responden. Mendapat perintah langsung dari ketua RW menjadi alasan kuat yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan. Disamping itu adanya waktu luang dan kesehatan juga berpengaruh dalam partisipasi masyarakat. Beberapa masyarakat yang tidak hadir dalam proses ini adalah masyarakat yang merasa kalau kehadirannya sudah diwakili oleh orang lain yang telah berpartisipasi. Sedang bekerja dan dalam keadaan sakit juga menjadi penyebab ketidakhadiran beberapa masyarakat.

Pada Tabel 26 juga terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam penanaman pipa saluran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang relatif sama. Perintah dari ketua RT adalah alasan utama partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan penanaman pipa saluran. Adanya undangan dan waktu luang juga mempengaruhi partisipasi beberapa orang masyarakat. Masyarakat yang tidak terlibat juga memiliki alasan yang sama dengan kegiatan-kegiatan tahapan pelaksanaan lainnya, beberapa orang merasa telah terwakili oleh yang ikut

berpartisipasi dan ada juga sedang bekerja di tempat lain serta tidak adanya undangan yang mengharuskan mereka mereka datang.

Tabel 26. Hasil Faktor-Faktor Terkait yang Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Penanaman Pipa Saluran dalam Program Pamsimas

No	Penanaman Pipa Saluran	Hadir		Penanaman Pipa Saluran	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Waktu luang	1	2,5	Tidak ada undangan	5	12,5
2.	Dapat undangan	7	17,5	Bekerja	3	7,5
3.	Kondisi fisik kuat	2	5	Merasa terwakili	10	25
4.	Perintah ketua RT	10	25	Sakit	2	5
J u m l a h		20	50		20	50

Tabel 27. Hasil Faktor-Faktor terkait yang dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Pembuatan WC dalam Program Pamsimas

No	Pembuatan WC	Ada		Pembuatan WC	Tidak ada	
		Orang	%		Orang	%
1.	Dana cukup	4	10	Belum ada dana	18	45
2.	Dana tersedia tapi tidak cukup	8	20	Tidak ada waktu	3	7,5
3.	Waktu luang	3	7,5	Bekerja	1	2,5
4.	Pola hidup sehat	3	7,5			
J u m l a h		18	45		22	55

Brderdasarkan Tabel 27, terlihat bahwa pada kegiatan pembuatan WC faktor yang mempengaruhi agak sedikit berbeda, ini dikarenakan pembuatan WC dilakukan secara pribadi di rumah masing-masing. Pembuatan WC umum belum dilaksanakan karena dana belum terealisasi. Pembuatan WC ini sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan masyarakat yang bersangkutan. Ada beberapa masyarakat yang telah menyelesaikan pembuatn WC, namun kebanyakaC ini dikarenakan dana belum mencukupi.

Dalam tahap pelaksanaan masyarakat tidak hadir dengan kesadaran sendiri melainkan karena ada intervensi dari ketua RT. Masyarakat yang tidak hadir dikarenakan tidak tau dan tidak di undang, sakit dan sedang bekerja menjadi halangan yang mutlak bagi warga yang tidak hadir. Bagi kaum perempuan bukan keahlian mereka. Kemauan warga ikut terlibat dalam kegiatan tidak sepenuhnya atas kesadaran sendiri, walaupun mereka sempat mereka lebih memprioritaskan kebutuhan rumah tangga yakni pemenuhan kebutuhan sehari.



#### 4.6.3. Tahap Evaluasi

Dalam tahap evaluasi, masyarakat Lambung Bukit kurang merespon tentang rapat Evaluasi program, yang datang hanya perwakilan dari RT masing saja dan ketua yang lama tidak datang karena adanya perselisihan antara ketua RT yang lama dan yang baru. Bagi simpatisan yang baru jika tidak hadir dikarenakan belum ada undangan resmi begitu juga kepada warga yang lain. Rapat evaluasi ini diselenggarakan karena usulan dari lurah baru yakni bapak Ermon. Yang ingin tau tentang permasalahan yang mendasar pada kelurahan Lambung Bukit dan penyelesaian program yang tertunda, hingga agenda kedepan. Namun hal ini tidak berjalan dengan lancar.

Tabel 28. Hasil Faktor-Faktor terkait yang dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Tahap Evaluasi dalam Program Pamsimas

No	Rapat Evaluasi	Hadir		Rapat Evaluasi	Tidak Hadir	
		Orang	%		Orang	%
1.	Waktu luang	1	2,5	Tidak ada undangan	5	12,5
2.	Dapat undangan	1	2,5	Konflik antar warga	9	22,5
3.	Sudah kewajiban	2	5	Merasa terwakili	10	25
4.	Perintah ketua RT	3	7,5	Adanya perintah tidak ikut ketua RT	9	22,5
Jumlah		7	17,5		33	82,5

Ada faktor terkait yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan keberlanjutan program diantaranya faktor sosial, ekonomi, budaya dan faktor alam.

#### 4.6.4. Faktor Sosial

Dalam menjalankan sebuah program yang berbasis masyarakat sangatlah diperhatikan hubungan sosial diantara masyarakat tersebut baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bekerja sama dalam pembangunan. Adanya kecemburuan diantara masyarakat dan perselisihan maka dengan dasar ini masyarakat menjadi malas ikut serta dalam pembangunan sarana air bersih. Hal ini berakibat kepada tidak selesainya sarana air bersih tersebut. Konflik yang terjadi pada Kelurahan Lambung Bukit bermula pada penggantian kepemimpinan

ketua RT. Hal ini menjadi pemecahan diantara masyarakat berakibat kepada hubungan diantara masyarakat tidak harmonis. Jika hubungan tidak baik maka pesan dan pengerjaan yang berbasis masyarakat tidak baik pula.

#### **4.6.5. Faktor Ekonomi**

Tingkat ekonomi masyarakat yang lemah menjadi faktor penyebab ketidakikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam membangun program dari hasil kuisioner di lapangan sebagian buruh beralasan sama dengan buruh lainnya, yakni; ketergantungan kepada pekerjaan yang tidak tetap menjadi penghambat ketidakhadiran mereka dalam menjalankan program, selain itu bagi masyarakat yang tidak mampu mereka lebih memilih kebutuhan pangan dari pada kebutuhan penunjang dengan alasan masalah pemenuhan kebutuhan. Jika mereka tidak bekerja satu hari saja, maka mereka harus mencari jalan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan misalnya; kebutuhan beli beras, biaya anak sekolah, biaya dapur, dan sebagainya. Hal ini menjadi alasan yang mendasar bagi masyarakat Lambung Bukit.

#### **4.6.6. Faktor Budaya**

Kehadiran dan keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit tidak terlepas dari faktor budaya. Hal ini dibuktikan dalam pemilihan ketua RT dan ketua RW, tetap yang dipilih adalah orang yang dituakan di adat dan disegani di masyarakat. Jika ketua RT ini sudah mengatakan sanggup maka warga dengan sendirinya akan mengikuti apa yang disarankan oleh ketua RT tersebut. Hal ini di jumpai pada sosok bapak Aliwar, selain tokoh masyarakat beliau juga ketua RW II. Jika beliau mengatakan ikut maka RT lain akan mengikut saja. Begitu juga jika beliau mengatakan tidak maka RT lain menuruti apa yang dikatakan Bapak Aliwar tersebut. Walaupun ada sebagian warga yang masih mengerjakan program Pamsimas tersebut, itu dikarenakan mereka terlibat langsung dalam pertanggung jawaban program seperti pihak LKM Nago Sati. Jika tidak ada warga yang ikut maka ketua LKM lah yang akan tetap jalan meneruskan pembangunan Pamsimas tersebut.

#### 4.6.7. Faktor Alam

Kelurahan Lambung Bukit yang terletak di Provinsi Sumbar merupakan kelurahan yang terkena gempa pada Bulan September 2009, yang seiring dengan munculnya program Pamsimas. Hal ini mengakibatkan teralihnya konsentrasi masyarakat dalam menjalankan program Pamsimas. Masyarakat mesti memperbaiki rumahnya yang rusak sehingga masyarakat tersebut harus berbagi waktu dengan program Pamsimas. Bagi masyarakat yang tidak memiliki uang cukup, menjadikan faktor ekonomi yang lebih dominan dikarenakan mereka harus mementingkan mencari uang dibandingkan membantu menyelesaikan program. Hal ini juga diungkapkan oleh mantan Lurah Lambung Bukit yakni bapak Ermon, kebutuhan masyarakat yang dibantu melalui program setelah gempa mempengaruhi keikutsertaan masyarakat sangat rendah dikarenakan adanya kebutuhan lain yang lebih penting dianggap warga yaitu perbaikan rumah mereka dan kebutuhan rumah tangga, karena rata-rata masyarakat yang memiliki tabungan mereka telah menyalurkan tabungan mereka dalam perbaikan rumah. Jadi tidak adanya jaminan masa depan membuat warga harus mencari kebutuhan ekonomi untuk masa yang akan datang dengan cara menjadi buruh dan bertani.

Faktor alam seperti gempa menjadikan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena adanya pemertingan kebutuhan, dan rasa cemas yang dimiliki warga jika tidak bekerja dan mencari uang akan mempengaruhi pendapatan mereka. Faktor ini membuat tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah, walaupun ada faktor kemauan yang tinggi, tetapi kesempatan membagi waktu yang minim/rendah menjadikan tingkat partisipasi masyarakat juga rendah.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di kelurahan Lambung Bukit kecamatan Pauh Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Mekanisme pelaksanaan program Pamsimas tidak tepat waktu dan hasil tidak sesuai dengan yang di harapkan. Sampai Desember 2011 belum juga selesai, sehingga masyarakat Lambung Bukit belum memanfaatkan hasil dari program Pamsimas tersebut.
2. Tingkat partisipasi masyarakat pada Program Pamsimas berada pada tingkat Sedang-Bawah (41,13%). Pada Tahap Perencanaan tingkat partisipasi Sedang (65,42%), tahap pelaksanaan Rendah-Atas (34.64 %) dan pada tahap Evaluasi Rendah-Bawah (13.75%).
3. Faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dilihat dari:
  - a. Kondisi sosial, ekonomi, budaya dan faktor alam semakin baik hubungan sosial antara masyarakat maka semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, begitu juga kondisi ekonomi masyarakat semakin baik kondisi ekonomi masyarakat semakin baik pula tingkat partisipasinya, didukung oleh budaya yang dianut oleh masyarakat, jika baik pikiran pengurus budaya atau adat maka akan baik pula kaum yang di pimpinnya, hal ini didukung kondisi alam sekitar, dikarenakan adanya bencana gempa bumi yang merusak fisik dan mental masyarakat pikiran dan partisipasi masyarakat pun terpecah.
  - b. Syarat tumbuh partisipasi yaitu kemauan, kemampuan dan kesempatan mempengaruhi tingkat partisipasi. Semakin tinggi kemauan, kemampuan dan kesempatan semakin tinggi tingkat partisipasinya.

## **1.2. Saran**

1. Petugas Pamsimas harus lebih disiplin dan bijaksana baik dalam segi waktu maupun pekerjaan
2. Sebaiknya ada aturan yang diberlakukan dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) agar sarana air bersih tersebut dapat selesai dengan jadwal yang telah ditentukan
3. Ditingkatkannya kerjasama antara petugas Pamsimas dan masyarakat agar terciptanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrison, Salmi. 1998. *Kinerja Usaha Masyarakat Penerima Dana Program Inpres Desa Tertinggal Sungai Kalu II dan Desa Tertinggal Pintu Kayu Gadang Kec. PWK Pakan Rabaa Sungai Pagu Kab. Solok*. Skripsi Fakultas Pertanian Unand. Padang
- Ashful, Ferdhinal. 2007. *Modul. Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Universitas Andalas. Padang
- Asnawi, Sofian. 1993. *Aspek Sosial Ekonomi dalam Pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT) Sumatera Barat. Makalah Seminar dan Kongres Ikatan Keluarga Alumni Unand*. Padang
- Astrid, S. Susanto. 1984. *Sosialisai Pembangunan*. Bina Cipta. Bandung
- BPTP, Ungaran. 1999. *Peran Kelompok Tani dalam Kegiatan Pengkajian*.
- Cahyono, Yohanes Budi. 2006. *Metode Pendekatan Sosial dalam Pembangunan Partisipatif. Community Development Based On Participation*. PPM-UK Petra. Jakarta.
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. 2005. *Pengelolaan jaringan irigasi dan prinsip pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif (PPIP)*. Departemen pekerjaan umum. Jakarta
- Faisal, Kasyrino. 1994. *Prospek Pengembangan Ekonomi Perdesaan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Firdaus, L.M. 1997. *Pengembangan Potensi Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Biak Num For Irian Jaya*. Jurnal Analisis CSIS Tahun XXVI No. 1 Januari – Februari 1997
- Hawkins, HS and AW, Van Den Ban. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.
- Idola, Putra. 2008. *Analisis Tingkat Partisipasi Petani dalam Penyelenggaraan Program PKPS-BBM IP*. [Skripsi]. Universitas Andalas
- Mardikanto, Totok. 2001. *Komunikasi Pembangunan*. Sebelas Maret et. University Press. Surakarta
- Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Nadjib (2003). *"Pengantar partisipasi : Membangun Sesuatu yang Tersembunyi"*. *Modul Program Dasar Pembangunan Partisipatif*. Penerbit RTI-USAID. Jakarta.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.



- Nuwirman. 2003. *Pembekalan Kader PBM: Panduan Penyusunan Perencanaan Bersama Masyarakat. Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP). Perform Project.*
- Pakpahan, Agus dan Soetatwo Hadi Wigono. 1993. *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia*
- Partowijoto, Achmadi. 2004. *Makna Partisipasi dalam Pengelolaan Terpadu Sumber daya Air & Sistem Irigasi.* PU-SDA. Jakarta
- Perdana, R., herlambang 2002. *Gagal panen dan buruknya saluran irigasi Teknis.* <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/jatim/gaga35.html>
- Slamet Margono. 2003. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.* LPM. IPB. Bogor
- Sumarto, Hetifah S.J. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia.* Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 440 Hal.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Kumpulan Essay Tentang Penanggulangan Kemiskinan.* Bina Rena Pariwira. Jakarta
- Tanjung, Faidil. 2001. *Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PPKP) dalam Implementasi Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan irigasi (PKPI).* Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- Tim Kornas. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan.* PNPM Mandiri Pedesaan. Jakarta
- PAMSIMAS 2009. *Petunjuk pedoman pengelolaan program Pamsimas.* jakarta
- PAMSIMAS 2009. *Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pamsimas di Tingkat Masyarakat.* Jakarta

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1. MATRIK DATA SET

No	Tujuan	Variabel yang Diamati	Indikator	Parameter	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisa Data
1.	Mendiskripsikan proses partisipasi, masyarakat dalam penyelenggaraan Program <b>Pamsimas</b> di kelurahan Lambung Bukit kotamadya padang	1. Tahap Perencanaan, Meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musyawarah perencanaan kegiatan</li> <li>- Musyawarah Pembentukan LKM</li> <li>- sosialisasi</li> </ul> 2. Tahap Pelaksanaan, Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Awal lokasi</li> <li>- Realisasi anggaran biaya</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa</li> <li>- Pembutan bak penampungan</li> <li>- Penggalan Saluran Pipa</li> <li>- Penanaman Pipa Saluran</li> <li>- Pembuatan Kran Umum</li> <li>- Pembuatan WC</li> </ul> 3. Tahap Evaluasi Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kegiatan</li> </ul>	a). Siapa yang ikut dalam kegiatan? b). Kenapa kegiatan ini dilakukan? c). Dimana kegiatan dilakukan? d). Bagaimana cara pelaksanaannya? e). Kapan kegiatan dilakukan? f). Apa yang dihasilkan dari kegiatan ini?		Responden dan informan kunci	Wawancara dan pengamatan langsung dilapangan dan kuisisioner	Deskriptif kualitataif & kuantitatif
2	Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS Lambung Bukit.	4. Tahap Perencanaan, Meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi masalah</li> <li>- Pembentukan LKM</li> <li>- sosialisasi</li> </ul> 5. Tahap Pelaksanaan, Meliputi:		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinggi</li> <li>• Sedang</li> <li>• Rendah</li> </ul>	Responden	Pengamtan langsung dilapangan deskriptif kualititatif dan kuantitatif	Deskriptif kualitataif & kuantitatif



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Awal lokasi</li> <li>- Realisasi anggaran biaya</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa</li> <li>- Pembutan bak penampungan</li> <li>- Penggalian Saluran Pipa</li> <li>- Penanaman Pipa Saluran</li> <li>- Pembuatan Kran Umum</li> <li>- Pembuatan WC</li> </ul> <p>6. Tahap evaluasi Meliputi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kegiatan</li> </ul>					
3	Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pamsimas di kelurahan Lambung Bukit kotamadya padang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemauan,</li> <li>2. kemampuan</li> <li>3. kesempatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Karakteristik masyarakat, Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umur</li> <li>- jenis kelamin</li> <li>- tingkat pendidikan</li> <li>- pekerjaan</li> </ul> </li> <li>b. faktor lain terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>- faktor sosial</li> <li>- Faktor ekonomi</li> <li>- Faktor buday</li> <li>- Faktor alam</li> </ul> </li> </ol>		Responden dan informan kunci	Wawancara pengamatan langsung dilapangan dan quisioner	Deskriptif kualitatif

**Lampiran 2. Rekap Data Tingkat Partisipasi Responden dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)**

No	Nama	JK	U S I a	Pendidikan	Pekerjaan	Tahap Perencanaan			Tahap Pelaksanaan							Tahap Evaluasi	Total
						1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	1	
1	Amiruddin	Lk	60	SD	Tani	2	2	0	0	0	1	1	0	0	2	0	8
2	Nuraini	Pr	55	Tidak sekolah	Tani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Yubir	Lk	42	SLTP	Tani	2	2	0	2	0	2	2	2	1	0	0	13
4	Mardaleni	Pr	38	SLTP	Wira swasta	2	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	8
5	Editawarman	Lk	41	SLTP	Buruh	2	2	0	1	1	2	1	2	1	0	0	12
6	Daryetti	Pr	36	SLTP	IRT	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
7	Nahar	Lk	50	SD	Tani	2	2	2	0	0	1	1	2	0	0	0	10
8	Yulita	Pr	43	SD	Tani	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	Irman	Lk	50	SD	Tani	2	2	2	0	0	1	1	2	1	0	0	11
10	Yulidar	Pr	44	Tidak sekolah	Tani	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5
11	Devi Putra	Lk	24	SLTA	Swasta	2	2	1	2	0	2	1	2	2	1	2	17
12	Dewita Irma Sari	Pr	23	SLTA	Swasta	2	2	2	0	1	0	0	1	0	1	0	9
13	Yusrinaldi	Lk	31	SLTP	Buruh	2	2	0	1	0	1	1	2	1	0	0	10
14	Irma Novita	Pr	31	SLTP	IRT	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6
15	Anas Ashari	Lk	43	SLTP	Buruh	2	2	1	0	0	2	1	0	1	0	2	11
16	Syafriani	Pr	34	SLTP	IRT	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	6
17	Amril Jamin	Lk	51	SD	Tani	1	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	6
18	Busra Narus	Lk	42	SLTP	Tani	2	2	2	0	1	2	1	2	1	1	0	14
19	Devi Andrita	Pr	42	SLTP	Wira swasta	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5
20	Dedi Saputra	Lk	35	SLTP	Buruh	2	2	2	1	0	1	1	2	1	0	0	12
21	Feniza	Pr	34	SLTP	Wira swasta	2	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7
22	Yubardi	Lk	47	SLTP	Tani	2	2	2	2	0	1	2	2	1	0	0	14
23	Erizayenti	Pr	41	SLTP	IRT	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
24	Nuraffis	Lk	42	SD	Tani	2	2	1	1	1	2	1	2	1	0	0	13
25	Syamsidar	Pr	39	SLTP	IRT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
26	Yardi	Lk	45	SLTP	Wira swasta	1	2	0	2	0	1	2	2	1	2	2	15
27	Irman	Lk	51	SD	Tani	2	2	2	0	0	1	1	2	1	0	0	11
28	Awarlis	Pr	45	SD	Tani	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5
29	Ermi	Lk	52	Tidak sekolah	Tani	0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	6
30	Eni Ermi	Pr	42	SD	Tani	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4

Empiran 2. (sambungan)

31	Yurnalis	Pr	42	SLTP	Buruh	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	
32	Armilan	Lk	30	SLTP	Buruh	2	1	2	1	0	2	1	2	2	0	1	14	
33	April Dinata	Lk	22	SLTA	Swasta	2	2	1	1	0	1	2	0	1	1	0	11	
34	Gusrialdi	Lk	28	SLTA	Swasta	2	0	1	0	0	1	1	2	2	1	0	10	
35	Metra	Lk	26	SLTA	Swasta	2	2	0	1	0	1	1	2	1	1	0	11	
36	Masdar	Lk	29	SLTP	Buruh	2	1	2	0	0	2	2	2	0	0	0	11	
37	April Dinata	Lk	22	SLTA	Swasta	1	2	1	1	0	1	2	2	2	1	0	13	
38	Tomi Basri	Lk	27	SLTA	Swasta	2	2	1	1	0	2	1	2	2	0	0	13	
39	Endri	Lk	29	SLTA	Swasta	2	2	2	1	0	1	2	2	0	1	0	13	
40	Gurialdi	Lk	28	SLTP	Buruh	1	2	1	0	1	1	2	0	1	0	2	11	
Jumlah						65	60	32	18	5	36	36	52	25	22	11	362	
Setiap Tahap						157			194							11		
Total						362												
Nilai yang diharapkan						880												
Tingkat partisipasi						362 / 880 X 100 = 41,13 % Tingkat partisipasi sedang bawah												
Rata-rata partisipasi masyarakat																		

1gka 2 menunjukan hadir dan ikut serta dalam kegiatan

1gka 1 menunjukan hadir saja

1gka 0 menunjukan tidak ikut sama sekali





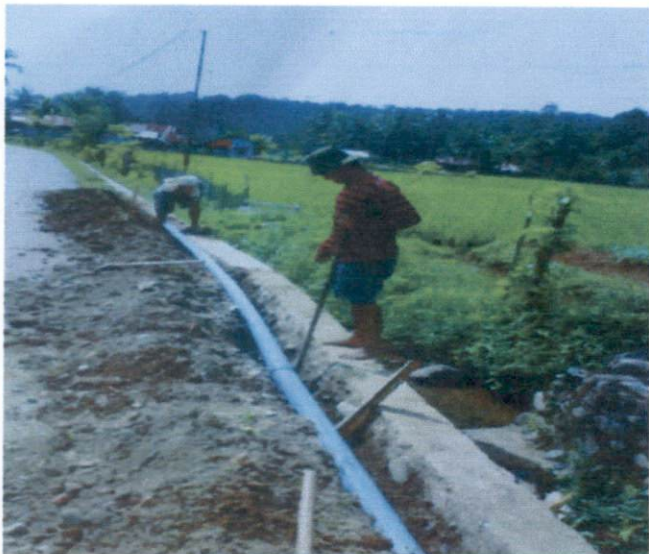
Plang Promosi Pamsimas



Plang Promosi Pamsimas

Penulis dengan Bapak Firdaus Jabar  
Ketua LKM Nago Sati

Plang Pamsimas LKM Nago Sati



Penggalian Pipa Saluran



Dokumentasi Kegiatan Kel. Lambung Bukit



No	Tanggal	Uraian	Penerimaan					Revisi Buku Jurnal	Kode Revisi	Pengeluaran										Kumulatif Pengeluaran	Saldo Kas		
			APBN	APBD	Bunga Bank	Masukan				RGM I	RGM II					RGM III							
						InCash	InKind				APBN	APBD	PNBS	PNBS	PNBS	PNBS	PNBS	PNBS	PNBS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	30-Sep-09	Biaya pembelian slide LKM									250,000										250,000	(250,000)	
	30-Oct-09	HVS 1 Rlm									25,000										25,000	(275,000)	
	5-Nov-09	Operasional LKM									65,000										65,000	(340,000)	
		Setoran Inceh				1,000,000															-	(340,000)	
	10-Nov-09	Transport									40,000										40,000	(380,000)	
		Transport									25,000										25,000	(405,000)	
	13-Nov-09	Fotocopy									23,000										23,000	(428,000)	
	15-Nov-09	Operasional LKM									100,000										100,000	(528,000)	
	16-Nov-09	Material									42,000										42,000	(570,000)	
		Fotocopy									37,500										37,500	(607,500)	
		Fotocopy									38,700										38,700	(646,200)	
	30-Nov-09	Bunga bank			1,551																	80,000	(726,200)
	4-Dec-09	Transport									80,000										80,000	(806,200)	
		Transport									88,000										88,000	(895,000)	
	5-Dec-09	Operasional LKM									48,000										48,000	(943,000)	
		ATK									40,000										40,000	(983,000)	
	6-Dec-09	Stampel dan Fotocopy									50,000										50,000	(1,033,000)	
	7-Dec-09	Fotocopy dan ATK									60,000										60,000	(1,093,000)	
	8-Dec-09	Transport									90,000										90,000	(1,183,000)	
		Setoran Inceh				8,100,000																35,000	(1,218,000)
	9-Dec-09	Transport									35,000											150,000	(1,368,000)
	10-Dec-09	Operasional LKM									150,000										150,000	(1,518,000)	
		Fotocopy									223,500										223,500	(1,741,500)	
	11-Dec-09	Ambil Uang di bank						6,000,000														-	4,800,300
	14-Dec-09	uang masuk		27,500,000																		4,800,300	4,800,300
	13-Dec-09	Operasional LKM									29,000										29,000	4,829,300	
	15-Dec-09	Fotocopy									8,500										8,500	4,837,800	
	17-Dec-09	Fotocopy									9,000										9,000	4,846,800	
	20-Dec-09	ATK									10,000										10,000	4,856,800	
	22-Dec-09	Fotocopy dan ATK									9,400										9,400	4,866,200	
	25-Dec-09	Operasional LKM									150,000										150,000	4,866,200	
		Jumlah		27,500,000	1,551	11,000,000		8,000,000		Jumlah	1,615,800										1,615,800	4,864,400	
		Total Penerimaan dalam bentuk InCash (4-5-6-7)						36,501,551														1,615,800	
		Saldo Bank (4+5-6-7-8)						37,501,551														4,384,400	
		Total Penerimaan dalam bentuk InCash dan InKind (4-5-6-7-8)						36,501,551														6,000,200	
		Jumlah																					
		Total pengeluaran untuk kegiatan dengan sumber dana APBN (14-15-16-17)																					
		Total pengeluaran untuk kegiatan dengan sumber dana APBD (12-13-18-19)																					
		Saldo Kas (23)																					
		Total pengeluaran = saldo kas																					

Pedana, 28 Desember 2009

ini untuk pembayaran kegiatan dalam RGM I dan RGM II

Kode Kegiatan BO : Biaya Operasional, A : AM, B : Bahan, U : Uraian

Ditandatangani :  
Lurah

adnan

Diperiksa :  
TFL

Diperiksa :  
Kard LKM

Prasno jebor

Ditandatangani :  
Ketua Satuk PAMSBAS

Isur

Ditandatangani :  
Bendahara Satuk PAMSBAS

Yandras

Kelurahan Lembang Subit

PAMERBAS TAHUN 2009

JUMLAH NILAI KEGIATAN

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan						Kode Isyarat BO BAKU	Pengeluaran										Kumulatif Pengeluaran	Saldo Kas		
			APBN	APBD	Bunga Bank	Masyarakat		Bank		RKM I													
						InCash	InKrd			APBD			APBN SAN	INCASH SAM	APBD				BPS				
										BOP	Pembelian	PHBS Set			PHBS May	PHBS Set	PHBS May						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	25-Dec-09	Retasibueksi sampai bulan lalu	-	27.500,000	1,561	11.000,000	-	6,000,000			1,815,600	-	-	-	-	-	-	-	-	1,815,600	4,384,400		
	27-Dec-09	Fotocopy dan ATK									80,000									80,000	4,324,400		
	28-Dec-09	Print									7,500									7,500	4,316,900		
		Fotocopy									9,400									9,400	4,307,500		
	29-Dec-09	uang masuk	36,500,000																	-	4,307,500		
	31-Dec-09	ATK									71,000									71,000	4,236,500		
		Bunga bank			47,567															-	4,236,500		
	1-Jan-10	Fotocopy dan ATK									178,000									178,000	4,058,500		
	5-Jan-10	Transport									20,000									20,000	4,038,500		
		Fotocopy									281,750									281,750	3,756,750		
	10-Jan-10	Amil Uang di bank						10,000,000												-	3,756,750		
	15-Jan-10	Fotocopy Materi Keuangan										170,000								170,000	3,586,750		
		Fotocopy Materi Teknik										208,000								208,000	3,378,750		
	16-Jan-10	ATK teknik dan Keuangan										41,000								41,000	3,337,750		
	19-Jan-10	ATK									14,000									14,000	3,323,750		
		Transport									20,000									20,000	3,303,750		
	21-Jan-10	Adm pinjaman untuk INCASH									400,000									400,000	2,903,750		
		Operasional LKM									100,000									100,000	2,803,750		
		Jumlah	36,500,000	27,500,000	49,138	11,000,000	-	18,000,000	Jumlah		2,767,250	420,000	-	-	-	-	-	-	-	3,177,250	2,803,750		
		Total Penerimaan dalam bentuk InCash (4+6+7)						77,049,138															
		Saldo Bank (4+5+6+7+8)						61,049,138															
		Total Penerimaan dalam bentuk InCash dan InKrd (4+6+7+8)						77,049,138															
		Total pengeluaran untuk kegiatan dengan sumber dana utama APBN (14+16+19+20)																					
		Total pengeluaran untuk kegiatan dengan sumber dana utama APBD (12+13+14+15+16+17)																			3,177,250		
		Saldo Kas (23)																			12,822,750		
		Total pengeluaran + saldo kas																			16,000,000		

Pada, 28 Desember 2009

ini untuk pembiayaan kegiatan dalam RKM I dan RKM II

Kode Kategori BO : Beye Operasional, A: Adm, B: Bahan, LK: LKRI

Dibuat oleh :  
Lurah

Diproses :  
TPT

Dibaca :  
Koord.LKRI

Ditandatangani :  
Kepala Seksi PAMERBAS

Ditandatangani :  
Bendahara Seksi PAMERBAS

adrian

Bendahara

Isar

Yendrew





# PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat Jalan Ujung Gurun No.2 Telp. 21414 Padang



## REKAPITULASI PEMBAYARAN KEPADA LKM

Sehubungan dengan Surat permintaan pembayaran nomor 03026 tanggal 2 November 2010, dengan ini disampaikan nama dan alamat LKM, nomor dan tanggal SPPB, nomor rekening pada Bank Nagari Capem Belimbing dan jumlah pembayaran sebagai berikut:

No.	LKM				Nomor Rekening	Jumlah Pembayaran (Rp.)
	NAMA	ALAMAT	NOMOR SPPB	TANGGAL SPPB		
1.	LKM Nago Sati	Kel. Lambung Bukit	010/SPPB II/PAMSIMAS- DPU/2010	29 Juli 2010	1012.0210.02600-8	77.000.000
JUMLAH						77.000.000

Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas isi rekapitulasi pembayaran kepada LKM ini.

Demikianlah Rekapitulasi Pembayaran kepada LKM ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:  
Pejabat Penanda Tangan SPM  
a.  
SUHARTIL, SE.MM  
Nip. 195909211982031007

Padang  
Pejabat Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen  
IR. HERMAN  
Nip. 195709291981011004

Rekapitulasi Pembayaran ini sebagai lampiran  
SP2D Nomor  
Tanggal:  
KPPN Padang  
Kepala Seksi Perbendaharaan

Nip.

# INGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PHLN

1. Nomor dan Tanggal DIPA : 1005/033-05.02/III/2010 31-12-2009
2. Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK : 4612 04941 573119
3. Nomor Loan dan Nomor Register : IDA Credit 4204-IND
4. Kategori : 3
5. Nomor dan Tanggal Kontrak : SPPB II No. 010/SPPB II/PAMSIMAS-DPU/2010 29-07-2010
6. Nomor dan Tanggal Addendum : - -
7. Nama Kontraktor / Perusahaan : LKM Nago Sati
  - Nama Bank : Bank Nagari Unit Balimbing
  - Nomor Rekening : 1012.0210.02600-8
  - Kode NPWP : 000000000201000
8. Alamat Kantor : RT 04/RW II Kelurahan Lambung Bukit
9. Prosentase Loan : 100 : 0
10. Nilai Kontrak : Rp 154.000.000,00
11. Porsi Pembayaran Loan : Rp 154.000.000,00
12. Porsi Pembayaran GOI : Rp 0,00
13. Uraian dan volume pekerjaan : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Lambung Bukit
14. Sistem Pembayaran : RK
15. Cara Pembayaran : Tahap
16. Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 hari
17. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 25-12-2010
18. Jangka Waktu Pemeliharaan : 0 hari
19. Ketentuan Sanksi :

Catatan :  
Apa bila terjadi addendum kontrak  
data kontrak agar disesuaikan  
dengan perubahannya.



**BERITA ACARA KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
Nomor : 010/LKM-NS-LB/X/2010

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan oktober tahun dua ribu sepuluh telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kegiatan program Pamsimas di kelurahan Lambung Bukit kecamatan Pauh kota Padang provinsi Sumatera Barat, dengan hasil sebagai berikut:





1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan:


- Kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat saat ini telah mencapai 3,39 %, belum dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang direncanakan. Sisa kegiatan 1,61 % berupa : pelatihan BPS.
- Pekerjaan fisik sarana dan sanitasi saat ini telah mencapai 51,55 %, telah dilaksanakan sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi / persyaratan teknis yang direncanakan. Sisa kegiatan 33,38 % berupa : pekerjaan sarana air minum.
- kegiatan peningkatan derajat kesehatan saat ini telah mencapai 5,65 % telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang direncanakan. Sisa kegiatan 4,42 % berupa : pengadaan fisik media kesehatan.

2. Jumlah bobot sampai 18 Oktober 2010 terhitung 60,59 %.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat berita acara:

No.	Nama	Selaku	Tandatangan
1.	Firdaus Jabar	Koord. LKM	1. 
2.	Detia Delimas, ST	Fasilitator Teknik	2. 
3.	Ir. Melda Lisnadi	Koord. Fasilitator kota (DFC)	3. 
4.	Ir Syarizal Mu'in	DMAC WSS Kota Padang	4. 

Mengetahui:  
DPMU Kota Padang 

  
(HASAN BASRI, ST)  
NIP. 19641026 199303 1 003



## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN KEGIATAN (SPKMK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDAUS DJABAR  
Jabatan : Koordinator LKM / penanggungjawab pelaksanaan program Pamsimas di desa/kelurahan Lambung Bukit kecamatan Pauh kota Padang provinsi Sumatera Barat, berdasarkan SPPB II nomor 010/SPPB II/PAMSIMAS-DPU/2010 tanggal 29 Juli tahun 2010. untuk kegiatan:  
1) peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat,  
2) pembangunan sarana air minum dan sanitasi, dan  
3) peningkatan derajat kesehatan melalui perubahan perilaku hidup tidak (bersih dan sehat)  
Alamat : RT.04 / RW II Kelurahan Lambung Bukit

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan oktober tahun dua ribu sepuluh menyatakan sanggup menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas sampai selesai (100%), dengan dibayarkannya dana hibah tahap ke 3 (tiga), sebesar Rp. 77,000,000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Dengan penjelasan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kemajuan pelaksanaan kegiatan:
  - Kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat saat ini telah mencapai 3,39 %, belum dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang direncanakan. Sisa kegiatan 1,61 % berupa : pelatihan BPS.
  - Pekerjaan fisik sarana dan sanitasi saat ini telah mencapai 51,55 %, telah dilaksanakan sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi / persyaratan teknis yang direncanakan. Sisa kegiatan 33,38 % berupa : pekerjaan sarana air minum.
  - kegiatan peningkatan derajat kesehatan saat ini telah mencapai 5,65 % telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang direncanakan. Sisa kegiatan 4,42 % berupa : pengadaan fisik media kesehatan.
- 2) Jumlah pengeluaran proyek yang sudah dipertanggungjawabkan Rp. 115.500.000
  - LPD tahap 1 sebesar Rp. 38.500.000
  - LPD tahap 2 sebesar Rp. 77.000.000


Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dana hibah tahap 3 (tiga) sebesar Rp 77.000.000 dapat dibayarkan.

Demikian surat pernyataan ini, dan dibuat dengan sebenarnya

Lurah  
Kelurahan Lambung Bukit

  
AFRIZAL  
NIP. 010176337

DPMU Kota Padang

  
(HASAN BASRI, ST)  
NIP. 19641026 199303 1 003

Padang, 18 Oktober 2010  
Koordinator LKM  
Kelurahan Lambung Bukit

  
FIRDAUS DJABAR

Mengetahui,

Koordinator Fasilitator Kota Padang

  
Ir. MELDA LISNADI

**BERITA ACARA PERMINTAAN PENCAIRAN DANA**  
Nomor : 136/BAPPD-CK/Pams-2010

Pada hari ini **senin** tanggal **delapan belas bulan oktober tahun dua ribu sepuluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **IR. HERMAN**  
Jabatan : **Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pamsimas kota Padang provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 206/KPTS/M/2010 tanggal 26 Januari 2010, dan SK perubahan menteri Pekerjaan Umum 349/KPTS/M/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang pengangkatan atasan Kepala Satuan Kerja bertindak untuk dan atas nama program Pamsimas**  
Alamat : **Jl. Ujung gurun No. Padang**

I. Nama : **FIRDAUS JABAR**  
Jabatan : **Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Nago Sati Kelurahan Lambung Bukit, bertindak untuk dan atas nama masyarakat Kelurahan Lambung Bukit**  
Alamat : **RT 04/RW II Kelurahan Lambung Bukit**

Berdasarkan :

1. DIPA : 1005/033-05.2/III-2010 tanggal 31 Desember 2009
2. SPPB II : 010/SPPB II/PAMSIMAS-DPU/2010 tanggal 29 juli 2010
3. Nilai SPPB II : Rp. 154.000,000 (seratus lima puluh empat juta rupiah)
4. Pekerjaan :
  - Pembangunan sarana air minum / sarana sanitasi
  - Promosi/penyuluhan/pelatihan perilaku hidup bersih & sehat
  - Penyiapan dan pelatihan unit kerja teknis dan kesehatan sebagai badan pengelola sarana dan kegiatan

Pembayaran : Penyaluran dana APBN di lakukan dalam 2 (dua) tahapan, tahap I 50%, tahap II 50%

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

1. LKM Nago Sati Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh kota Padang telah siap melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam RKM, tahap (I, II) kegiatan program PAMSIMAS tahun anggaran 2010.

2. Rincian penggunaan dana :

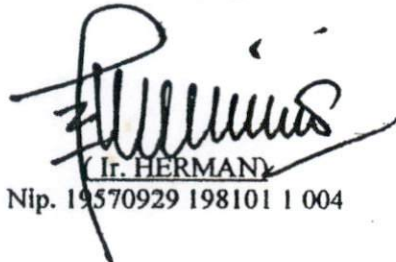
Dana hibah yang disetujui	: 154,000,000
Penarikan s/d tahap lalu	: <u>77,000,000</u>
Sisa dana s/d tahap lalu	: 77,000,000
Sisa dana di rekening LKM	: 0
Sisa dana di kas LKM	: <u>0</u>
Jumlah sisa di rekening + kas	: 0
Penggunaan dana s/d tahap lalu	: <u>115,500,000</u>
Jumlah	: 115,500,000
Penarikan tahap ini	: 77,000,000
Sisa dana yang belum ditarik	: 0

3. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administrasi, maka LKM layak untuk memperoleh pembayaran tahap ke tiga sebesar Rp. 77.000.000 dengan rincian :
  - Pembangunan sarana air minum dan sanitasi
  - Promosi/penyuluhan/pelatihan perilaku hidup bersih & sehat
  - Penyiapan unit teknis dan kesehatan sebagai badan pengelola sarana dan kegiatan kesehatan
4. Pembayaran dana hibah tersebut di atas disalurkan ke rekening LKM yang bersangkutan, nomor rekening 1012.0210.02600-8 pada Bank Nagari Unit Balimbing Padang.
5. Dengan telah disalurkannya pemberian bantuan ini maka LKM bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk Tim Fasilitasi Masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 oktober 2010

PPK Satker SNVT/SKS Pamsimas  
kota Padang

  
(Ir. HERMAN)  
Nip. 19570929 198101 1 004

Koord. LKM Nago Sati  
Kel. Lambung Bukit  
Kota padang

  
( FIRDAUS JABAR )

Mengetahui,  
DPMU/PMAC/PMC Kota padang

  
**HASAN BASRI-ST**  
NIP. 19641026 199403 1 003